

**IMPLEMENTASI DIGITALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN MELALUI
E-RAPOR DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 ABUNG TINGGI**

Tesis

Oleh

AGHISNA AMALIA PUTRI

NPM 2226061020



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

**IMPLEMENTASI DIGITALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN MELALUI
E-RAPOR DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 ABUNG TINGGI**

Oleh

AGHISNA AMALIA PUTRI

NPM 2226061020

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

ABSTRAK

IMPLEMENTASI DIGITALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN MELALUI E-RAPOR DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 ABUNG TINGGI

Oleh

Aghisna Amalia Putri

Transformasi digital pendidikan melalui e-Rapor merupakan urgensi nasional guna mewujudkan sistem penilaian yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, penerapannya di sekolah wilayah perdesaan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Oleh karena ini, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi digitalisasi kebijakan pendidikan melalui e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara administratif SMAN 1 Abung Tinggi telah menerapkan e-Rapor sesuai panduan, namun pelaksanaannya belum optimal secara substantif karena sering dianggap sebatas kewajiban administratif akhir semester. Faktor pendukung penelitian ini adanya komitmen pimpinan, kerja sama antar guru, dan pendampingan operator. Sebaliknya, Faktor penghambat penelitian ini adanya literasi digital antar guru, ketidakstabilan jaringan internet sekolah, dan Tidak adanya pedoman kerja resmi dari sekolah. Temuan ini memberi wawasan penting program digitalisasi pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi sarana di daerah perdesaan. Kesimpulannya, penerapan kebijakan ini masih dalam masa peralihan dan memerlukan banyak perbaikan. Peneliti menyarankan agar sekolah segera membuat aturan kerja tertulis, mengadakan pelatihan berkelanjutan, dan memperbaiki fasilitas internet, yang juga bisa dikembangkan oleh penelitian selanjutnya.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Digitalisasi Pendidikan, e-Rapor, Literasi Digital, Sekolah Perdesaan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DIGITIZATION OF EDUCATION POLICY THROUGH E-REPORT CARDS AT STATE HIGH SCHOOL 1 ABUNG TINGGI

By

Aghisna Amalia Putri

The digital transformation of education through e-Rapor is a national urgency to realize an efficient, transparent, and accountable assessment system. However, its implementation in rural schools still faces various obstacles in the field. Therefore, this study aims to analyze the implementation of digitalization of education policies through e-Rapor at SMAN 1 Abung Tinggi, as well as identify supporting and inhibiting factors for its implementation. The research uses a descriptive qualitative method by collecting observational data, in-depth interviews, and documentation. The results of the study revealed that administratively SMAN 1 Abung Tinggi has implemented e-Rapor according to the bath, but its implementation has not been optimal substantively because it is often considered limited to an administrative obligation at the end of the semester. The supporting factors for this research are the commitment of the leadership, cooperation between teachers, and operator assistance. On the other hand, the inhibiting factors in this study are digital literacy among teachers, instability of the school internet network, and the absence of official work guidelines from schools. These findings provide important insights that education digitalization programs must be adjusted to the condition of facilities in rural areas. In conclusion, the implementation of this policy is still in a transition period and requires a lot of improvement. The researchers suggest that schools immediately create written work rules, conduct ongoing training, and improve internet facilities, which can also be developed by further research.

Keywords: *Policy Implementation, Education Digitalization, e-Report, Digital Literacy, Rural Schools.*

Judul Tesis

: **IMPLEMENTASI DIGITALISASI
KEBIJAKAN PENDIDIKAN MELALUI E-
RAPOR DI SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 ABUNG TINGGI**

Nama Mahasiswa

: **Aghisna Amalia Putri**

NPM

: **2226061020**

Program Studi

: **Magister Ilmu Administrasi**

Fakultas

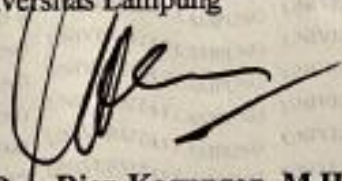
: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A. Ph.D
NIP. 1198506202008122001


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP. 197507202003121002

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

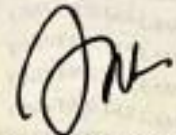

Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H.
NIP. 196908151997032001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.



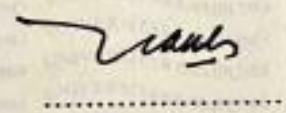
Sekretaris

Dr Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.



Penguji Utama

Prof. Bambang Utoyo S, M.Si.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustian Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 18 Februari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "Implementasi Digitalisasi Kebijakan Pendidikan Melalui E-rapor Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Abung Tinggi" adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Aghisna Amalia Putri
NPM. 2226061020

RIWAYAT HIDUP



Aghisna Amalia Putri lahir di Bandar Jaya, 11 Juni 2000 buah hati dari pasangan Bapak “**Anwar Sadat**” dan Ibu “**Erliani**”.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di SD Negeri 1 Ulak Rengas dan diselesaikan tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 3 Bukit Kemuning lulus tahun 2015 dan Pendidikan

menengah atas di SMA Negeri 1 Abung Tinggi yang diselesaikan tahun 2018. Pada tahun 2018, penulis diterima sebagai salah satu mahasiswa di Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung dan selesai tahun 2022. Alhamdulillah pada tahun 2022, penulis kembali diberikan amanah untuk melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Lampung.

MOTTO

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya"*

- QS. Al-baqarah : 286 -

*"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan
lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu
serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi
gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan"*

- Boy Chandra -

**"Tetap tenang, terbarkan senyuman, dan yakinlah semua orang
sedang berproses menuju versi terbaiknya"**

- Aghisna Amalia Putri -

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta sebagai penyemangat hidupku terutama untuk menyelesaikan kuliah ini, keluarga tersayang yang selalu mendukung dan sahabat tersayang yang telah menjadi penyemangat diperjalanan perkuliahan ini serta almamaterku tercinta.

SANWACANA

Puji dan Syukur aku panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis telah menyelesaikan naskah tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI DIGITALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN MELALUI E-RAPOR DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 ABUNG TINGGI”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam kepenulisan naskah tesis sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu dalam prosesnya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti di masa mendatang untuk mengembangkan topik serupa dalam objek yang berbeda.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.S., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustiana Z., S.Sos., M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP Universitas Lampung
5. Ibu Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara substansial yang membangun dan bermanfaat dalam penyusunan tesis.
6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan

serta masukan, kritik, dan saran secara kepenulisan dan substansial yang bermanfaat dalam penulisan tesis.

7. Bapak Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si. sebagai Penguji telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara kepenulisan dan substansial yang bermanfaat dalam penyusunan tesis.
8. Segenap Dosen Magister Ilmu Administrasi, FISIP, UNILA dan Staf Sekretariat. Terhusus Mba Vivi , Mba Fitri, dan Mba Shella selaku staf sekretariat yang selalu membantu berbagai hal administrasi dan lainnya selama proses menyelesaikan studi.
9. Kedua orang tua tercinta Papa tercinta Anwar Sadat dan Mama tersayang Erliani, terima kasih atas cinta yang begitu tulus, doa yang tak pernah lelah kalian panjatkan, serta pengorbanan yang sering kali tidak terlihat namun selalu terasa. Setiap langkah yang mampu aku tempu hari ini berdiri di atas sabar, air mata, dan perjuangan papa dan mama. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas semua kebaikan kalian, dan semoga setiap pencapaian ini menjadi doa yang kembali pada kebahagiaan dan kesehatan papa dan mama
10. Kakak Agung Zefthar Agung Trengginas, Mba Yayuk Cholifah Cahyani Putri, serta adik-adikku Azizia Auliyatul Alda dan Muhamar Al Farizi yang selalu mendukung dan mendoakan agar dapat menyelesaikan kuliahnya.
11. Segenap rekan di Magister Ilmu Administrasi angkatan 22 Kak Dewi, Mba Rizka, Kak Putri, Kak Vike, Kak Alfajar, Mba Eka, Mba Sri, Kak Alfajar, Kak Jaya dan Kak Fajar Adi yang selalu memberikan semangat dan nasehat dan kebersamaan dalam perkuliahan hingga menyelesaikan kuliah ini.
12. Sahabatku Helen, Mei, dan Putri yang selalu memberikan semangat dan doa selama perjalanan perkuliahan. Untuk sahabatku almarhumah Inka Oktaviani, namamu selalu hidup dalam doa dan kenangan, dan akan selalu menjadi bagian indah dalam perjalanan hidupku. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjuangan dan ceritaku
13. Bapak Johan Supangkat, M.M., M.Pd selaku Pengawas Manajerial Cabdin Cabdin Pendidikan Wilayah IV Provinsi Lampung, Bapak Triyanto, S.Ag., M.M selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Abung Tinggi, Bapak Agus Mawarzi, S.Pd selaku Waka Kurikulum SMAN 1 Abung Tinggi, Bapak Tumiyanto

Dumyati selaku Operator SMAN 1 Abung Tinggi, Guru dan Staff SMAN 1 Abung Tinggi, serta Wali Murid SMAN 1 Abung Tinggi yang terlibat dalam membantu dalam menyelesaikan penulis tugas akhir studi ini.

14. Terakhir, anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya, “**Aghisna Amalia Putri**”. Ya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima Kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Bandar Lampung, 18 Februari 2026

Aghisna Amalia Putri

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Teori Kebijakan Publik.....	12
2.2.1 Proses Kebijakan Publik	13
2.3 Implementasi Kebijakan	14
2.3.1 Konsep Implementasi Kebijakan.....	17
2.3.2 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik.....	19
2.3.3 Model-Model Implementasi kebijakan.....	21
2.4 Kebijakan Digitalisasi Pendidikan di Indonesia	28
2.4.1 Landasan Hukum dan Regulasi Penggunaan Teknologi Informasi di Sekolah.....	29
2.4.2 Strategi Pemerintah dalam Penerapan <i>Education Technology</i>	31
2.5 Konsep E-Rapor.....	33
2.5.1 Definisi dan Fungsi E-Rapor	33
2.5.2 Proses Penggunaan E-Rapor.....	34
2.5.3 Prosedur E-Rapor	36
2.5.4 Mekanisme Kerja sistem e-Rapor.....	38
2.6 Kerangka Berpikir	39
III METODE PENELITIAN	43
3.1 Tipe Penelitian	43
3.2 Fokus Penelitian.....	44
3.3 Lokus Penelitian	46

3.4 Sumber Data	46
3.5 Informan Penelitian	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data	48
3.7 Teknik Analisis Data	50
3.8 Teknik Keabsahan Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum	54
4.1.1 Visi, Misi dan Tujuan 2020	59
4.1.2 Struktur Organisasi	60
4.2 Hasil Penelitian.....	61
4.2.1 Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pendidikan melalui e-Rapor di..	62
SMA Negeri 1 Abung Tinggi	62
4.2.2 Faktor-faktor Pendukung Serta Penghambat Yang Memengaruhi.....	91
Keberhasilan Implementasinya.....	91
4.3 Pembahasan	98
4.3.2 Faktor-Faktor Pendukung serta Penghambat yang Memengaruhi	122
Keberhasilan Implementasinya.....	122
V KESIMPULAN DAN SARAN	131
5.1 Kesimpulan.....	131
5.2 Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN.....	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Tenaga Pendidik dan Usia Tenaga Pendidik Pada SMAN 1 Abung Tinggi	5
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3. Informan Penelitian.....	48
Tabel 4. Tenaga Kependidikan.....	55
Tabel 5. Tenaga Pendidik.....	57
Tabel 6. Pelajar SMAN 1 Abung Tinggi Tahun pelajaran 2025/2026	58
Tabel 7. Faktor Pendukung	94
Tabel 8. Faktor Penghambat	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Implementaasi Kebijakan Merilee S. Grindle.....	24
Gambar 2. Model Implemenasi Kebijakan Van Meter and Van Horn	27
Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Edward III.....	28
Gambar 4. Kerangka Berpikir.....	42
Gambar 5. Tampak Depan SMAN 1 Abung Tinggi	55
Gambar 6. Struktrur Organisasi	60
Gambar 7. Surat Edaran	64
Gambar 8. Aplikasi E-rapor	65
Gambar 9. Pendampingan Penggunaan E-rapor	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital dalam dunia pendidikan Indonesia terus mengalami percepatan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat. Perubahan ini tidak hanya bersifat adaptif terhadap perkembangan global, tetapi juga merupakan respons strategis terhadap tuntutan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan di era digital. Dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional, digitalisasi dipandang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan mutu manajemen pendidikan, memperluas akses layanan dan memperkuat sistem penjamin mutu berbasis data. Salah satu bentuk konkret dari implementasi kebijakan digitalisasi tersebut adalah penerapan e-Rapor, sebuah sistem aplikasi yang dirancang untuk mengubah paradigma tata kelola administrasi penilaian siswa dari model konvensional berbasis kertas menuju sistem digital yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) (Kemendibudristek SMA, 2024).

Berbeda dengan model konvensional berbasis kertas yang rawan terhadap kesalahan input, keterlambatan distribusi, dan keterbatasan penyimpanan arsip, e-Rapor menghadirkan sistem penilaian yang lebih akurat, efisien, terstandarisasi, serta aman secara digital. Integrasi langsung dengan DAPODIK memungkinkan data hasil belajar siswa dikelola secara real-time, mudah ditelusuri, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy making*) menjadi lebih efektif (JOISIE, 2024). Lebih dari sekadar perangkat administratif, e-Rapor berfungsi sebagai instrumen penting dalam tata kelola pendidikan digital yang mendukung kolaborasi antar pemangku kepentingan mulai

dari guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, hingga kementerian (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2022).

Penerapan e-Rapor memiliki dasar regulasi yang kuat sebagai implementasi dari agenda nasional digitalisasi pendidikan, yang secara eksplisit diamanatkan dalam kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Salah satu landasan utamanya adalah Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, yang menegaskan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik harus dilakukan secara sistematis, akurat, transparan. Kebijakan ini diperkuat oleh Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 yang mengatur fleksibilitas kurikulum dalam kondisi khusus, serta dapat dilaporkan dengan cepat melalui teknologi informasi. Kebijakan ini sejalan dengan arah Merdeka Belajar yang menekankan data sebagai basis utama pengambilan keputusan pendidikan, serta RPJMN 2020–2024 yang menetapkan digitalisasi pendidikan sebagai prioritas strategis nasional. Dengan demikian, implementasi e-Rapor bukan hanya inovasi teknis, tetapi bagian dari agenda besar reformasi tata kelola pendidikan.

Dalam konteks operasional, e-Rapor berfungsi tidak hanya sebagai perangkat administrasi penilaian, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mengintegrasikan data penilaian hasil belajar ke dalam DAPODIK. Aliran data ini memungkinkan konsolidasi informasi secara vertikal dari sekolah ke dinas pendidikan hingga kementerian, sehingga memperkuat monitoring mutu pendidikan secara nasional. Kebijakan turunan, seperti Kepmendikbud No. 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum dalam Kondisi Khusus, turut memperkuat relevansi penggunaan e-Rapor sebagai bagian dari strategi transparansi dan akuntabilitas pendidikan (Kemendikbud Direktorat SMA, 2024).

Pengembangan e-Rapor tidak hanya dimaksudkan untuk memudahkan guru dalam menginput dan mengolah nilai, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan, konsistensi, keterlacakan (*traceability*) data akademik siswa dari semester ke semester. Sistem ini di rancang untuk terhubung secara langsung dengan DAPODIK dan *Education Management Information System* (EMIS) sebagai basis data nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Direktorat SMA, 2025). Integrasi ini memungkinkan setiap pembaruan

nilai, baik hasil Penilaian Harian (PH), Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PPAS), Maupun Penilaian Akhir Tahunan (PAT), tercatat secara *real-time* di server pusat, sehingga meminimalkan risiko duplikasi, kehilangan data, manipulasi nilai, maupun keterlambatan pelaporan (Putri & Firmansyah, 2023). Pada sistem konvensional berbasis kertas, permasalahan tersebut sering menjadi hambatan dalam penjaminan mutu penilaian. Dengan e-Rapor, seluruh proses administrasi menjadi lebih terstandarisasi, efisien, dan aman secara digital, sesuai prinsip *good governance* dalam manajemen pendidikan (DetikEdu, 2024).

Penerapan e-Rapor membawa implikasi terhadap tata kelola mutu pendidikan. Dengan tersedianya data nilai yang terpusat, tervalidasi dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang, analisis capaian pembelajaran dapat dilakukan secara akurat, cepat dan berbasis bukti. Data ini menjadi instrumen penting bagi pengambil kebijakan di tingkat sekolah, dinas pendidikan, maupun kementerian untuk merumuskan intervensi pembelajaran yang tepat sasaran (Dewi & Sukiman, 2021). Pendekatan berbasis data ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Kementerian pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi, di mana proses pengambilan keputusan pendidikan harus didasarkan pada informasi yang valid, terukur, dan kontekstual

Sejak awal pengembangannya, e-Rapor terus diperbarui untuk menyesuaikan kebutuhan sistem penilaian. Misalnya, pembaruan pada tahun 2018 menghadirkan fitur impor kehadiran dan pencadangan data (Kemendikbud, 2019), sementara versi 22.1 yang dirilis pada tahun 2022 telah disesuaikan dengan Kurikulum Merdeka (Kemendikbudristek, 2022). Pada 2023, versi terbaru memperkuat integrasi dengan DAPODIK dan keamanan data (Direktorat SMA, 2025). Evolusi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan e-Rapor berjalan efektif. Namun, implementasi di sekolah perdesaan seperti SMAN 1 Abung Tinggi tetap menghadapi hambatan, baik dari segi literasi digital guru maupun keterbatasan infrastruktur.

SMAN 1 Abung Tinggi, yang berdiri pada tahun 2010 di Kabupaten Lampung Utara, merupakan salah satu satuan pendidikan menengah atas yang berkomitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sejak awal, sekolah ini berupaya

menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan nasional, termasuk dalam aspek administrasi penilaian. Tonggak penting terjadi pada tahun 2022, ketika SMAN 1 Abung Tinggi secara resmi mengimplementasikan e-Rapor sebagai instrumen utama pelaporan hasil belajar siswa. Langkah ini sejalan dengan kebijakan digitalisasi pendidikan yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam kerangka Merdeka Belajar, serta pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan sesuai Permendikbud No. 23 Tahun 2016. Implementasi e-Rapor tidak hanya memperkuat akuntabilitas penilaian dan efisiensi administrasi pendidikan, tetapi juga memungkinkan integrasi langsung dengan Dapodik sehingga data hasil belajar dapat digunakan untuk analisis capaian pembelajaran yang lebih akurat.

Selain memperkuat akuntabilitas penilaian, penerapan e-Rapor juga meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan karena terhubung langsung dengan sistem pusat, sehingga data hasil belajar siswa dapat dimanfaatkan secara optimal dalam analisis capaian pembelajaran. Sistem ini mendukung pengelolaan data mulai dari Penilaian Harian hingga Penilaian Akhir Tahun secara terintegrasi, serta memiliki mekanisme sinkronisasi otomatis ke server nasional. Pada tahun 2023, diperkenalkan versi terbaru dengan peningkatan keamanan dan optimalisasi pengelolaan data hasil belajar (Putri & Firmansyah, 2023).

Meski demikian, implementasi e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi masih menghadapi tantangan teknis maupun struktural. Berdasarkan hasil pra-riset, pelaporan digital belum berjalan optimal karena tidak semua guru dan staf memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan sistem. Kondisi ini selaras dengan temuan bahwa keterbatasan literasi digital khususnya pada guru berusia di atas 40 tahun, menjadi penghalang signifikan dalam adopsi teknologi pendidikan. Sementara guru yang lebih muda cenderung lebih (Pratolo et al., 2023). Ketergantungan pada guru muda ini seringkali menyebabkan transfer keterampilan tidak merata, sehingga kompetensi digital di lingkungan sekolah belum terdistribusi dengan baik di antara seluruh tenaga pendidik. Hambatan serupa juga ditemukan dalam studi mengenai ketimpangan kapasitas digital guru antarwilayah di Indonesia, yang mengakibatkan adopsi teknologi pendidikan berjalan tidak merata (Zulaikha et al., 2022)

Tabel 1. Jumlah Tenaga Pendidik dan Usia Tenaga Pendidik Pada SMAN 1 Abung Tinggi

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Rentang Usia Keseluruhan	Jumlah
1	Tenaga pendidik laki-laki	9	23-40 Tahun	24
2	Tenaga Pendidik perempuan	30	41-60 Tahun	15

Sumber: Dokumen Lampiran Pembagian Tugas SMAN 1 Abung Tinggi TP. 2025/2026

Berdasarkan jumlah tenaga pendidik pada SMAN 1 Abung Tinggi, terdapat 42 tenaga pendidik yang terdiri dari 9 guru laki-laki dan 30 guru perempuan. Jika dilihat dari distribusi usia, mayoritas guru, yaitu sebanyak 24 orang, berada pada rentang usia 23-40 tahun, sedangkan sisanya, yaitu 15 orang, berada pada rentang usia 41-60 tahun. Meskipun mayoritas guru berada pada usia produktif yang umumnya memiliki kemampuan adaptasi teknologi lebih tinggi, proporsi guru senior yang signifikan tetap menjadi tantangan. Hambatan adaptasi guru berusia lanjut terhadap teknologi berimplikasi pada lambatnya proses pembelajaran digital, serta memperbesar ketergantungan pada kelompok guru yang lebih muda. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur, terutama akses internet di wilayah pedesaan, semakin memperburuk proses sinkronisasi data e-Rapor dengan DAPODIK. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan faktor eksternal di lapangan (Harahap et al., 2025).

Selain aspek sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan signifikan. Koneksi internet yang tidak stabil seringkali menghambat proses input dan sinkronisasi data, sehingga pelaporan hasil belajar tidak dapat berjalan optimal. Permasalahan ini memperlihatkan bahwa implementasi e-Rapor tidak cukup dipandang sebagai masalah teknis semata, melainkan perlu dipahami sebagai bagian dari persoalan kebijakan publik yang menyangkut kesiapan sumber daya, kondisi sosial, serta infrastruktur penunjang. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi menjadi relevan untuk merumuskan strategi penguatan kapasitas tenaga pendidik dan perbaikan infrastruktur agar digitalisasi pendidikan dapat berlangsung optimal.

Penelitian terdahulu mengenai e-Rapor umumnya lebih menitikberatkan pada aspek, seperti kemudahan input nilai, integrasi dengan sistem Dapodik, serta efisiensi administrasi guru. Namun, kajian yang mengaitkan kebijakan digitalisasi pendidikan nasional dengan realitas implementasi di sekolah perdesaan masih jarang ditemukan. Sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada sekolah yang sudah mapan secara teknologi, sementara eksplorasi terhadap sekolah dengan keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan kompetensi digital guru masih terbatas (Nugraha & Anggraini, 2019). Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk diisi, agar literatur tentang digitalisasi pendidikan lebih kaya dan kontekstual.

Menanggapi kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji implementasi e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi secara mendalam. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menghubungkan kebijakan digitalisasi pendidikan pada level nasional dengan dinamika pelaksanaan di sekolah perdesaan. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menawarkan rekomendasi strategis agar implementasi digitalisasi pendidikan dapat lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan infrastruktur sekolah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan pendidikan di sekolah perdesaan, sekaligus memperkaya literatur akademik tentang implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi merupakan fenomena penting yang mencerminkan kesiapan sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, serta keselarasan dengan kebijakan nasional digitalisasi pendidikan. Tantangan yang muncul, mulai dari keterbatasan literasi digital guru, ketergantungan pada tenaga pendidik yang lebih muda, hingga kondisi infrastruktur pedesaan yang belum memadai, menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan ini bersifat multidimensional. Pada sisi lain, tuntutan kebijakan Merdeka Belajar dan percepatan transformasi digital yang dicanangkan pemerintah pusat memberikan tekanan sekaligus peluang bagi sekolah untuk melakukan inovasi dalam tata kelola pendidikan. Dalam konteks SMAN 1 Abung Tinggi harus mampu menyeimbangkan antara keterbatasan sumber daya

dengan keharusan memenuhi standar nasional, sehingga dibutuhkan strategi implementasi yang tepat untuk memastikan keberhasilan digitalisasi pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berjudul **“Implementasi Digitalisasi Kebijakan Pendidikan Melalui e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi”**, dengan tujuan untuk mengkaji dinamika pelaksanaan e-Rapor, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan rekomendasi strategis yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara praktis maupun akademis dalam pengembangan pendidikan berbasis digital di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang di kemukakan tersebut, maka rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan digitalisasi kebijakan pendidikan melalui e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi sesuai kebijakan nasional digitalisasi pendidikan?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi e-Rapor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang di kemukakan tersebut, maka rumusan masalah yaitu:

1. Menganalisis implementasi e-Rapor sebagai bentuk digitalisasi kebijakan pendidikan di SMAN 1 Abung Tinggi.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan implementasi e-Rapor dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur, dan dukungan kelembagaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan pendidikan

berbasis digital di tingkat satuan pendidikan. Hasil penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan e-Rapor, seperti aspek regulasi internal, kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana, komunikasi antarorganisasi, serta partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini memperkuat relevansi teori implementasi kebijakan publik dalam konteks digitalisasi pendidikan di wilayah perdesaan yang memiliki keterbatasan sumber daya. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan model implementasi kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi serta dinamika kelembagaan sekolah.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi SMAN 1 Abung Tinggi untuk memperjelas aturan pelaksanaan e-Rapor melalui penyusunan SK Tim e-Rapor dan SOP yang jelas. Selain itu, penelitian ini mendorong peningkatan kemampuan dan literasi digital guru serta meningkatkan keterlibatan wali murid agar pelaksanaan e-Rapor lebih transparan dan berjalan dengan baik.
- 2) Menjadi rujukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dalam menyusun program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan bagi sekolah. Selain itu, dapat membantu memperbaiki komunikasi dan koordinasi agar pelaksanaan e-Rapor lebih terencana dan tidak menimbulkan kendala teknis di lapangan.
- 3) Memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Pemangku kebijakan pendidikan dalam penyediaan anggaran serta penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi, terutama di sekolah perdesaan. Hasil penelitian ini juga dapat membantu dalam menyusun strategi digitalisasi pendidikan yang lebih merata dan berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu cara untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan kesamaan dalam judul penelitian, namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Diah Rusmala Dewi & Sukiman (2021)	Implementasi Pelaporan Hasil Asesmen Berbasis E-Rapor	Kualitatif	menunjukkan bahwa implementasi e-Rapor di SMAN 9 Balikpapan Utara didukung sarana prasarana layak, SDM yang cukup mampu mengoperasikan perangkat, serta administrator yang memahami teknologi. Secara keseluruhan, e-Rapor berjalan baik dan efektif, membantu guru dalam pengelolaan serta pelaporan hasil asesmen
2	(Fajrin & Machali, 2023)	Impelementasi Penggunaan Rapor Digital Madrasah Berbasis <i>Online</i> dalam Menyusun Administrasi Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik	Kualitatif-deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi rapor digital berbasis website dan Rapor Digital Madrasah (RDM) online memberikan manfaat signifikan bagi administrasi penilaian di madrasah. Dibanding metode konvensional dan Microsoft Excel, keduanya lebih efektif dengan keunggulan seperti input data yang sederhana, otomatis, mengurangi perhitungan manual, serta

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				kemudahan akses dan pengelolaan nilai kapan saja. RDM online juga meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan kompetensi pendidik, sekaligus mendukung manajemen pendidikan berbasis teknologi yang modern dan praktis.
3	(SUYATNO, 2023)	e-Rapor Pada Sekolah Dasar Negeri Cawang 09 Jakarta Berbasis WEB		Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Rapor berbasis web di SDN Cawang 09 Jakarta Timur meningkatkan efisiensi pengelolaan nilai dan absensi, membuatnya lebih mudah, cepat, dan terorganisir. Fitur login sesuai hak akses dan desain mendukung mutu penilaian serta laporan. Sistem ini juga mempercepat pengolahan data, meski tetap memerlukan pelatihan dan SDM yang memahami teknologi
4	(Insan & Idris, 2024)	Implementasi Penilaian Belajar Secara Digital Berbasis Aplikasi E-Rapor Untuk Dokumentasi akademik	Penelitian kualitatif	menunjukkan bahwa aplikasi e-Rapor berbasis Django dengan arsitektur Model View Template (MVT) efektif mengelola data hasil belajar siswa secara digital. Aplikasi ini menyimpan data sistematis, memfasilitasi transfer PDF, dan memisahkan tugas pengelolaan data untuk memudahkan pemeliharaan. Pengujian black box membuktikan semua fungsi berjalan baik, sehingga arsitektur MVT mendukung pengembangan aplikasi yang efisien, terstruktur, dan mudah dipelihara guna meningkatkan efektivitas penilaian dan dokumentasi akademik.
5	(Riri Hartati dan Waskito 2024)	Penerapan e-Rapor Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Kecamatan Luak	Metode kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-Rapor di SMK telah memberikan beberapa dampak positif. Sebagian besar guru dan siswa melaporkan peningkatan efisiensi dalam penilaian dan pelaporan hasil belajar. Namun sejumlah tantangan juga diidentifikasi, termasuk ketersediaan infrastruktur teknologi, keterampilan guru dalam menggunakan sistem, dan ketidakpastian keamanan data.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan uraian pada tabel penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kelima studi yang dikaji memiliki fokus yang sama dalam membahas implementasi e-Rapor sebagai bagian dari digitalisasi administrasi penilaian di satuan pendidikan. Seluruh penelitian menempatkan e-Rapor sebagai inovasi yang mampu

meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan data hasil belajar siswa. Penelitian terdahulu (Dewi & Sukiman, 2022; Fajrin & Machali, 2023; Suyati, 2023; Prima Insan dkk., 2024; Hartati & Waskito, 2024) menunjukkan bahwa e-Rapor memudahkan proses input nilai, mempercepat penyusunan laporan, serta dapat terintegrasi dengan sistem manajemen pendidikan berbasis teknologi. Sejalan dengan itu, penelitian ini memposisikan e-Rapor sebagai instrumen utama dalam mendukung digitalisasi pendidikan nasional, khususnya agenda Merdeka Belajar dan pemanfaatan data pendidikan secara real-time.

Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini sama-sama menemukan tantangan dalam implementasi, antara lain keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital guru, serta kebutuhan pelatihan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi e-Rapor tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur, kompetensi pengguna, dan dukungan kebijakan yang konsisten. Penelitian ini memperluas perspektif dengan menempatkan e-Rapor dalam kerangka kebijakan digitalisasi pendidikan nasional sekaligus menyoroti konteks sekolah di wilayah perdesaan yang menghadapi tantangan multidimensional.

Perbedaan mendasar penelitian ini dibandingkan lima studi terdahulu terletak pada fokus kajian. Studi-studi sebelumnya umumnya berfokus pada aspek teknis implementasi, seperti pengembangan sistem berbasis web (Suyati, 2023), perancangan arsitektur aplikasi (Prima Insan dkk., 2024), atau perbandingan efektivitas dengan metode konvensional (Fajrin & Machali, 2023) pada sekolah dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang relatif memadai. Sebaliknya, penelitian ini mengintegrasikan analisis kebijakan digitalisasi pendidikan nasional dengan studi kasus di SMAN 1 Abung Tinggi, sekolah yang berada di wilayah perdesaan dan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, kesenjangan literasi digital, serta ketergantungan pada guru muda dalam pengoperasian teknologi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek teknis, tetapi juga menelaah dinamika sosial dan kebijakan yang melingkupi implementasi e-Rapor di sekolah perdesaan.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan tersebut, dapat diidentifikasi adanya research gap yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Mayoritas

studi terdahulu membuktikan manfaat e-Rapor, namun belum menelaah penerapannya secara mendalam di sekolah perdesaan dengan keterbatasan sumber daya. Selain itu, keterkaitan implementasi e-Rapor dengan kebijakan digitalisasi pendidikan nasional juga belum banyak dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji implementasi e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi melalui perpaduan analisis kebijakan dan studi lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual bagi sekolah dengan karakteristik serupa.

2.2 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian utama dalam ilmu administrasi publik dan ilmu politik yang bersifat multidimensional, kompleks, dan melibatkan beragam perspektif teoritis. Secara umum, kebijakan publik dapat dipahami sebagai seperangkat keputusan atau tindakan yang disusun secara sistematis oleh pemerintah atau kelompok berkepentingan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini tidak hanya merepresentasikan produk dari proses politik, tetapi juga menjadi respons pemerintah atau aktor pemerintahan terhadap permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang muncul (Dwidjowijoto, 2012, dikutip dalam Iriawan, 2024). Pemahaman mendalam mengenai konsep ini menjadi prasyarat penting bagi pembuat kebijakan agar mampu merumuskan langkah strategis yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.

Dalam perspektif Harold Lasswell dan Abraham Kaplan, kebijakan publik merupakan program yang dirancang secara terencana, berlandaskan pada tujuan, nilai, dan praktik tertentu. Pandangan ini menegaskan bahwa kebijakan publik bukan hasil keputusan spontan, melainkan buah perencanaan matang yang memadukan dimensi normatif (nilai dan tujuan) dengan dimensi praktis (mekanisme pelaksanaan) (Iriawan, 2024). Berbeda dengan itu, David Easton memandang kebijakan publik sebagai hasil aktivitas pemerintah yang mencakup seluruh tindakan dan keputusan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Perspektif ini menempatkan kebijakan publik sebagai konsekuensi logis dari fungsi pemerintahan, yang dapat berbentuk peraturan maupun dampak nyata bagi publik (Iriawan, 2024).

Carl I. Friedrich menambahkan dimensi lingkungan sebagai variabel penting. Menurutnya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah yang beroperasi dalam lingkungan tertentu yang mengandung peluang dan ancaman. Dengan demikian, perumusan kebijakan harus mempertimbangkan kondisi objektif sosial, politik, dan ekonomi agar mampu memanfaatkan potensi sekaligus mengantisipasi hambatan (Adianto & Maryani, 2014, dalam Iriawan, 2024). James Anderson melihat kebijakan publik sebagai tindakan yang disengaja, direncanakan, dan dijalankan oleh satu atau lebih aktor kebijakan untuk mengatasi permasalahan prioritas. Ia menekankan sifat relatif stabil kebijakan publik, yang memungkinkan pemberian dampak berkelanjutan, seperti program jangka panjang penguatan keamanan atau rehabilitasi sosial (Iriawan, 2024).

Dengan demikian, kebijakan publik tidak dapat dipahami secara tunggal. Ia merupakan kombinasi dari proses politik, keputusan strategis, nilai-nilai normatif, dan adaptasi terhadap dinamika lingkungan. Pemahaman komprehensif terhadap konsep dasar ini akan membantu peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan merumuskan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus efektif dalam implementasi jangka panjang

2.2.1 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik adalah serangkaian fase tahap atau fase untuk membuat kebijakan publik. Kebijakan publik yang diterima oleh masyarakat adalah tujuan publik yang dibuat dengan campur tangan masyarakat. Selain itu, transparansi terhadap pembuatan kebijakan publik perlu untuk memberikan kepuasan pada masyarakat. Menurut William N. Dunn (dalam Fatmarianti, 2023) proses kebijakan publik adalah serangkaian langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Proses kebijakan publik dapat dikembangkan sebagai berikut :

1. Proses Pengkajian Kebijakan,
Menyediakan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi ini terdiri dari protokol, aturan, dan sistem yang digunakan untuk menciptakan, menilai

secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan.

2. Proses Pembuatan Kebijakan,

Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu.

3. Proses Komunikasi Kebijakan,

Hasil dari upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, membuat dan menilai secara kritis kebijakan Perumusan proses kebijakan publik mencakup pembuatan agenda pemerintahan, pembuatan usulan kebijakan publik, pengesahan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik, dan penilaian. Fase analisis harus menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan. Rancangan kebijakan dan berbagai alternatif harus dianalisis untuk menentukan kebijakan yang paling efektif dan dapat diterapkan dengan baik (Kusuma, 2020).

Dengan demikian, proses kebijakan publik perlu diperhatikan secara seksama agar mampu memperoleh respons yang positif dari masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Respons masyarakat menjadi aspek yang sangat krusial karena menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan. Kebijakan publik tidak hanya dituntut untuk dirumuskan secara tepat, tetapi juga harus melalui proses pembuatan yang transparan, akuntabel, serta mengakomodasi pendapat dan masukan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan tersebut merupakan komponen penting yang dapat meningkatkan kepercayaan, dan berkelanjutan pelaksanaan kebijakan.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik yang menentukan sejauh mana kebijakan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurut (Rusdiyanta et al., 2022) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya ditetapkan melalui undang-undang, namun dapat pula melalui perintah eksekutif atau putusan pengadilan. Keputusan tersebut idealnya memuat identifikasi masalah, tujuan yang hendak dicapai, serta

teori sebab-akibat yang menjelaskan mekanisme pencapaian tujuan. Dalam praktiknya, terutama pada kebijakan yang mengatur perilaku ekonomi swasta, proses implementasi dimulai dengan pengesahan undang-undang, diikuti keluaran kebijakan (*policy outputs*) dari lembaga pelaksana, kepatuhan kelompok sasaran, dan revisi regulasi jika diperlukan.

Implementasi memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara formulasi dan evaluasi kebijakan. Transformasi kebijakan menjadi aksi nyata dilakukan melalui program yang dirancang dan dilaksanakan oleh aktor kebijakan, mencakup pembentukan atau penguatan organisasi, penugasan tanggung jawab, penerjemahan undang-undang ke dalam peraturan teknis, perekrutan personel, alokasi anggaran, dan pelaksanaan tugas administratif. Menurut Dye bahwa keputusan birokrat dalam proses ini berperan besar dalam membentuk arah kebijakan, terutama karena keterbatasan waktu, energi, dan keahlian legislatif maupun eksekutif dalam mengelola isu-isu kompleks (Rusdiyanta et al., 2022). Sejalan dengan pandangan tersebut. (Meutia, 2017) dalam bukunya menjelaskan bahwa implementasi merupakan tahapan yang sangat penting, karena kebijakan yang telah dibuat tidak akan berarti apa-apa jikat tidak dapat dilaksanan secara efektif oleh pelaksana di lapangan.

Senada dengan itu, Howlett, Ramesh, dan Perl (2020) memandang implementasi sebagai aktivitas mengubah maksud dan sumber daya kebijakan menjadi tindakan yang menghasilkan keluaran (*outputs*) tertentu, yang selanjutnya menentukan tercapai atau tidaknya hasil (*outcomes*). Proses ini juga dapat memengaruhi tahap lain dalam siklus kebijakan, misalnya melalui interpretasi tujuan atau modifikasi desain program (Rusdiyanta et al., 2022). Sementara Udoji (Wahab, 2012) menegaskan bahwa implementasi sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri, sebab kebijakan tanpa implementasi hanyalah cetak biru tanpa dampak.

Berbagai pakar memberikan definisi implementasi kebijakan dengan penekanan berbeda. Van Meter dan Van Horn (1975) memandangnya sebagai tindakan oleh individu di sektor publik maupun swasta untuk mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Mazmanian dan Sabatier (1980) menyoroti peristiwa yang terjadi

setelah suatu program dijalankan, sementara Wahab (2012) menekankan keterlibatan aktor, organisasi, prosedur, dan teknik untuk merealisasikan tujuan kebijakan. Winarno (2012) menambahkan bahwa kerja sama lintas aktor menjadi kunci keberhasilan implementasi.

Menurut Nugroho (2009) bahwa implementasi bertujuan memastikan kebijakan mencapai sasaran yang dirumuskan dan berpihak pada kelompok yang paling terdampak masalah. Sementara Parsons (2011) memandang kebijakan publik sebagai intervensi pemerintah terhadap aktivitas manusia, di mana implementasi berfungsi menegaskan tujuan melalui desain proses yang tepat. Grindle (1980; 2017) mengklasifikasikan implementasi ke dalam dua bentuk, yaitu langsung melalui pelaksanaan program atau melalui kebijakan turunan. Dalam praktiknya, implementasi sering diwujudkan dalam bentuk regulasi atau keputusan administratif yang dijabarkan ke dalam proyek dan kegiatan operasional (Rusdiyanta et al., 2022).

Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tahapan teknis administratif dalam siklus kebijakan publik, melainkan sebagai fase strategis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan dalam menjawab permasalahan publik. Menegaskan bahwa keberhasilan implementasi memerlukan kesiapan organisasi pelaksana dan dukungan lingkungan yang memadai agar tujuan kebijakan tidak mengalami penyimpangan (Meutia, 2017). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor kebijakan dalam menerjemahkan tujuan normatif ke dalam tindakan operasional yang realistis, didukung oleh struktur organisasi yang memadai, sumber daya yang cukup, serta mekanisme koordinasi dan komunikasi lintas aktor yang efektif. Selain itu, implementasi juga menuntut adanya fleksibilitas dalam merespons dinamika lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, tanpa kehilangan arah tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, komitmen berkelanjutan dari para pelaksana, kepatuhan kelompok sasaran, serta proses evaluasi dan penyesuaian kebijakan menjadi prasyarat penting agar kebijakan publik tidak berhenti sebagai dokumen normatif, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

2.3.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap strategis dalam siklus kebijakan publik yang berfungsi sebagai penghubung antara proses formulasi dan evaluasi kebijakan. Tahap ini tidak sekadar menerjemahkan keputusan politik ke dalam prosedur birokrasi, tetapi juga melibatkan proses konkretisasi kebijakan yang mencakup identifikasi aktor pembuat kebijakan, konteks perumusan, dampak yang ditimbulkan, serta mekanisme pelaksanaan dan evaluasinya (Syahrudin, 2020). Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan memunculkan konsekuensi langsung bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Konsekuensi positif menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan, sedangkan konsekuensi negatif dapat berupa efek samping atau kegagalan yang menimbulkan permasalahan baru. Oleh karena itu, implementasi menjadi arena penentu apakah kebijakan berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang efektif atau sekadar dokumen normatif tanpa dampak nyata. Secara konseptual, implementasi merupakan kelanjutan logis dari formulasi kebijakan, di mana strategi dan tujuan yang telah dirumuskan diterjemahkan menjadi tindakan operasional melalui program, proyek, atau regulasi turunan. Proses ini memerlukan mekanisme kerja yang terstruktur, koordinasi antarpelaksana, dan alokasi sumber daya yang memadai (Syahrudin, 2020)

Menurut (Syahrudin, 2020), Edward III (1980) mendefinisikan implementasi sebagai tahap yang menghubungkan perumusan kebijakan dengan konsekuensi yang dirasakan kelompok sasaran. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya. Kebijakan yang buruk akan tetap gagal meskipun diimplementasikan dengan baik, begitu pula kebijakan yang baik tetapi diimplementasikan secara keliru akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Lebih lanjut (Syahrudin, 2020) mengutip Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 2012) yang mengklasifikasikan kegagalan implementasi ke dalam dua bentuk utama, yaitu *non-implementation* (tidak terlaksana) dan *unsuccessful implementation* (pelaksanaan yang tidak berhasil). Faktor penyebabnya meliputi:

- a. Pelaksanaan yang kurang baik (*bad execution*)
- b. Kebijakan sendiri yang memang jelek (*bad policy*), dan
- c. Kebijakan yang bernasib (*bad luck*)

Dalam penjelasan (Syahrudin, 2020) Edward III (1980) menegaskan bahwa struktur birokrasi merupakan determinan utama keberhasilan implementasi kebijakan, berfungsi menjembatani formulasi dengan realisasi program. Kelemahan struktural seperti prosedur kaku, rantai komando panjang, dan fragmentasi tanggung jawab dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Pandangan ini sejalan dengan Grindle (1980), (dalam Winarno, 2012) melalui konsep *policy delivery system*, yang menekankan pentingnya mekanisme, prosedur, dan kelembagaan efektif, disertai komunikasi jelas, pembagian tugas tegas, serta koordinasi berkelanjutan.

Baik Edward III maupun Grindl, sebagaimana (Syahrudin, 2020), menempatkan birokrasi adaptif yang responsif terhadap perubahan, mengintegrasikan masukan pemangku kepentingan, serta memiliki mekanisme pengawasan efektif sebagai kunci keberhasilan implementasi. Hal ini menuntut reformasi birokrasi berorientasi hasil, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas SDM. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn (1975) (Syahrudin, 2020), mendefinisikan implementasi sebagai tindakan terencana oleh aktor publik maupun privat untuk mencapai tujuan kebijakan, yang keberhasilannya bergantung pada sinkronisasi antara perencanaan, ketersediaan sumber daya, dan komitmen pelaksana. Menurut Winarno (2012) (dalam Syahrudin, 2020), studi implementasi kebijakan hadir untuk mengatasi dua kekurangan utama, yaitu keterbatasan pemahaman terhadap proses kebijakan dan lemahnya kualitas saran yang diberikan kepada pembuat kebijakan. Parsons (2002) (dalam (Syahrudin, 2020) menambahkan bahwa studi implementasi muncul pada era 1970–1980an sebagai upaya melengkapi analisis kebijakan yang cenderung mengabaikan pengaruh birokrasi dan penyedia layanan terhadap efektivitas kebijakan.

Secara historis, perkembangan studi implementasi terbagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama (1970-an) memandang implementasi sebagai kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya. Generasi kedua (1980-an) memperkenalkan pendekatan *top-down* yang menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan sesuai instruksi politik oleh birokrasi, serta pendekatan *bottom-up* yang menekankan peran aktor lokal. Generasi ketiga (1990-an), sebagaimana dirumuskan Malcom I. Goggin, menyoroti bahwa perilaku aktor pelaksana menjadi

faktor kunci keberhasilan implementasi, melahirkan pendekatan kontinjensi yang menekankan pentingnya adaptabilitas. Sabatier (1986) mengklasifikasikan dua model berpengaruh, yakni *top-down* (model elit, model proses, model inkremental) dan *bottom-up* (model kelompok dan model kelembagaan). Menurut (Syahrudin, 2020), Parsons (2001) kemudian menguraikan perkembangan studi implementasi ke dalam empat tahap utama, yaitu:

1. Analisis kegagalan
2. Model Rasional (*top-down*) untuk mengidentifikasi faktor yang menjadikan implementasi berhasil
3. Kritik bottom-up terhadap model top-down, dalam hal ini pentingnya aktor lain dan interaksi organisasional, dan
4. Teori hybrid, dimana implementasi diligit sebagai evolusi, pembelajaran, kontinum kebijakan analisis interorganisational, tipe kebijakan dan manajemen sektor publik.

Selain itu, (Syahrudin, 2020) Juga mengutip Hill dan Hupe (dalam Nawawi, 2009) mengklasifikasikan implementasi ke dalam tiga pendekatan utama: *top-down*, *bottom-up*, dan *synthesizer*. Pendekatan *synthesizer* berupaya menggabungkan keunggulan kedua model sebelumnya dengan mempertimbangkan interaksi multi-level antara perumus kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat. Dengan demikian, implementasi kebijakan adalah tahap krusial yang menentukan efektivitas kebijakan publik. Keberhasilannya memerlukan kombinasi antara desain kebijakan yang tepat, sumber daya yang memadai, dukungan birokrasi yang efisien, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

2.3.2 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Menurut (Syahrudin, 2020) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh keterpaduan berbagai unsur yang bekerja secara simultan. Implementasi tidak semata-mata mengeksekusi keputusan politik, melainkan suatu proses kompleks yang memerlukan dukungan isi kebijakan yang jelas, kapasitas pelaksana yang memadai, keterlibatan kelompok sasaran, serta lingkungan kebijakan yang kondusif. Keempat unsur ini saling berhubungan dan membentuk

kerangka analisis komprehensif untuk memahami dinamika implementasi kebijakan.

1. Isi Kebijakan

Isi kebijakan merujuk pada substansi dan tujuan kebijakan yang hendak dicapai. kejelasan tujuan, konsistensi norma hukum, kelengkapan instrumen, serta adanya petunjuk teknis yang rinci merupakan prasyarat penting agar kebijakan dapat dijalankan sesuai rencana. Kebijakan yang ambigu membuka ruang multitafsir sehingga dapat menimbulkan perbedaan dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, kualitas desain kebijakan pada tahap perumusan akan sangat menentukan keberhasilan tahap implementasi. Dalam konteks kebijakan pendidikan misalnya, kurikulum yang jelas beserta instrumen evaluasi yang terstandar akan membantu guru dalam menerapkannya secara konsisten.

2. Pelaksana Kebijakan

Unsur kedua adalah aktor atau lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan. Kapasitas birokrasi, kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, serta mekanisme koordinasi menjadi faktor krusial. Menurut (Syahrudin, 2020) birokrat di tingkat bawah sering berperan sebagai *street-level bureaucrats*, yaitu pelaksana kebijakan yang menyesuaikan aturan dengan realitas lokal. Dengan demikian, kualitas, integritas, dan profesionalisme pelaksana berperan signifikan dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Lemahnya kapasitas birokrasi, baik karena keterbatasan sumber daya maupun masalah koordinasi, sering menjadi penyebab utama kegagalan implementasi.

3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang menjadi objek maupun penerima manfaat kebijakan. Respon mereka dapat berupa dukungan, resistensi, atau partisipasi aktif, yang semuanya berimplikasi pada tingkat keberhasilan implementasi. Pelibatan kelompok sasaran sejak tahap perencanaan kebijakan dapat meningkatkan legitimasi sekaligus penerimaan (*policy acceptance*). Tanpa dukungan dari kelompok sasaran, kebijakan berpotensi mengalami hambatan bahkan penolakan. Misalnya, kebijakan digitalisasi administrasi sekolah hanya

akan berhasil jika guru sebagai pelaksana teknis memiliki kesiapan dan kemauan untuk menggunakannya.

4. Lingkungan Kebijakan

Unsur terakhir adalah lingkungan kebijakan yang mencakup faktor politik, sosial, ekonomi, budaya, serta kondisi geografis. Menurut (Syahrudin, 2020), lingkungan yang stabil dan kondusif akan memperlancar implementasi, sedangkan kondisi yang penuh konflik atau keterbatasan infrastruktur justru dapat menghambat. Misalnya, kebijakan pendidikan berbasis digital akan lebih mudah diimplementasikan di wilayah dengan akses internet memadai, dibandingkan daerah terpencil dengan keterbatasan jaringan. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi pelaksana terhadap dinamika lingkungan menjadi indikator penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan.

Keempat unsur dalam implementasi kebijakan publik bukanlah faktor yang berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling memengaruhi. Kelemahan pada salah satu unsur dapat mereduksi efektivitas implementasi secara keseluruhan, sementara sinergi di antara isi kebijakan, kapasitas pelaksana, dukungan kelompok sasaran, lingkungan kebijakan, serta komunikasi yang efektif akan menciptakan kondisi ideal bagi keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan publik perlu mempertimbangkan keterpaduan seluruh unsur tersebut secara menyeluruh. Pemahaman ini menjadi sangat penting, terutama dalam konteks kebijakan sektoral seperti administrasi pendidikan. Sebagai contoh, dalam penerapan e-Rapor, keberhasilan implementasi bergantung pada kejelasan kebijakan teknis, kesiapan infrastruktur pendukung, kompetensi operator, serta tingkat penerimaan guru dan siswa sebagai pengguna akhir.

2.3.3 Model-Model Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses strategis yang menerjemahkan rumusan kebijakan publik menjadi tindakan konkret di lapangan. Dalam konteks pendidikan, tahap ini mencakup penerapan keputusan administratif, regulasi, dan program strategis menjadi praktik operasional oleh satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, kultural, dan organisasional yang memengaruhi

keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Dalam manajemen kebijakan publik, kontribusi keberhasilan berasal dari perencanaan sekitar 20%, implementasi 60%, dan pengendalian pelaksanaan 20%. Tahap implementasi kerap menjadi tantangan karena sering muncul masalah yang tidak terantisipasi pada tahap perencanaan, seperti rendahnya konsistensi pelaksanaan (Kasmad, 2021). Sehubungan dengan itu, kajian ini membahas sejumlah model implementasi kebijakan dari para ahli sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan implementasi.

1. Model Grindle

Merilee S. Grindle (1980) memandang implementasi kebijakan sebagai *political and administrative process* yang dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).

1) Isi Kebijakan (*content of policy*)

a. Kepentingan yang Terpengaruh (*interes*)

Tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kepentingan yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, perlu diperhatikan apakah kebijakan tersebut hanya mempresentasikan kepentingan kelompok tertentu atau mencakup kepentingan masyarakat secara luas. Kebijakan akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar apabila mendapat dukungan luas dari masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dukungan tersebut akan lebih mudah diperoleh apabila kebijakan selaras dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, dan sebaliknya, kebijakan akan berpotensi ditolak apabila dianggap tidak mengakomodasi kepentingan tersebut.

b. Jenis Manfaat (*type of benefits*)

Keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat signifikan bagi kelompok sasaran. Apabila manfaat yang dihasilkan besar dan relevan dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka dukungan terhadap kebijakan akan semakin kuat. Sebaliknya, jika manfaat yang dirasakan minim atau tidak sesuai harapan, maka dukungan akan melemah, yang pada akhirnya dapat menghambat keberhasilan implementasi.

- c. Tingkat Perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*)
Kebijakan yang menargetkan perubahan besar umumnya menghadapi tantangan implementasi yang lebih kompleks. Semakin besar perubahan yang diharapkan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan dalam mewujudkannya, baik karena hambatan struktural, resistensi dari pihak-pihak tertentu, maupun keterbatasan sumber daya.
- d. Lokasi Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)
Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh letak otoritas pengambilan keputusan. Semakin jauh lokasi atau tingkat pengambilan keputusan dari area implementasi, semakin besar potensi hambatan yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, kedekatan antara pengambil keputusan dengan pelaksana di lapangan cenderung mempermudah koordinasi dan pengawasan.
- e. Pelaksana Program (*Program Implementors*)
Kualitas pelaksana menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi. Implementor yang memiliki kompetensi teknis, integritas, dan komitmen tinggi terhadap tujuan kebijakan akan meningkatkan peluang keberhasilan. Sebaliknya, kelemahan pada aspek sumber daya manusia dapat menjadi penghambat serius dalam pelaksanaan program.
- f. Sumber Daya yang dialokasikan (*resources committed*)
Ketersediaan sumber daya, baik dalam bentuk dana, fasilitas, teknologi, maupun tenaga kerja, menjadi elemen kunci yang mendukung keberhasilan implementasi. Kekurangan sumber daya akan membatasi ruang gerak pelaksana dan menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara optimal.

2) Lingkungan Kebijakan (*context of implementation*)

Selain isi kebijakan, factor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Terdapat tiga indikator penting dalam kategori ini:

- a. Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat (*power, interests, and strategies of actors involved*)
Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kekuatan, kepentingan, dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat. Aktor yang

memiliki posisi strategis dan dukungan kuat dapat mempercepat pencapaian tujuan kebijakan

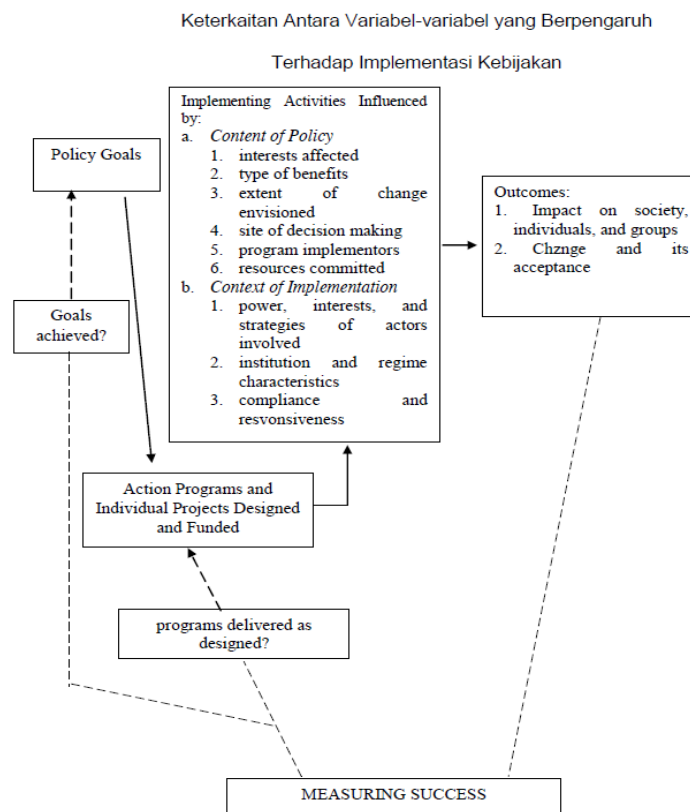
b. Karakteristik Institusi dan Rezim (*institution and regime characteristics*)

Dukungan dari institusi dan rezim yang berkuasa merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan kebijakan. Tingkat dukungan ini dapat bervariasi tergantung pada sifat dan orientasi rezim yang sedang memerintah.

c. Kepatuhan dan Reponsivitas (*compliance and responsiveness*)

Kebijakan akan berjalan efektif apabila terdapat keselarasan antara tujuan kebijakan dan desain program, serta apabila para pelaksana menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Gambar 1. Model Implementaasi Kebijakan Merilee S. Grindle



2. Model Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) termasuk salah satu model klasik yang memandang proses implementasi berlangsung secara linier, dimulai dari perumusan kebijakan publik, pelaksana kebijakan (implementor), hingga menghasilkan kinerja kebijakan. Model ini mengidentifikasi enam variabel utama yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan kinerjanya, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan penegakan, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi pelaksana kebijakan.

a. Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy standards and Objectives*)

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kejelasan standar dan tujuan yang ditetapkan. Indikator keberhasilan yang jelas akan meminimalkan perbedaan interpretasi di kalangan pelaksana. Sebaliknya, ketidakjelasan tujuan berpotensi memicu kesalahan arah dalam pelaksanaan kebijakan dan bahkan dapat menyebabkan kegagalan implementasi.

b. Sumber Daya Kebijakan (*Policy Resources*)

Selain kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi faktor penting. Sumber daya ini mencakup dana, materi, tenaga kerja, dan insentif yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan. Insentif dapat berupa penghargaan bagi pelaksana yang berhasil, atau sanksi bagi yang gagal memenuhi target pelaksanaan.

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Penegakan (*Interorganizational Communication and Enforcement Activities*)

Komunikasi yang efektif antarorganisasi pelaksana berperan penting dalam menyampaikan informasi, memperjelas standar kinerja, serta memastikan sinkronisasi pelaksanaan di berbagai tingkatan. Selain itu, kegiatan penguatan seperti pemberian bantuan teknis, supervisi, dan insentif positif maupun negatif akan membantu menjaga konsistensi implementasi kebijakan.

d. Karakteristik Lembaga Pelaksana (*Characteristics of the Implementing Agencies*)

Kualitas lembaga pelaksana juga menjadi penentu keberhasilan implementasi. Menurut Ripley (dalam Van Meter & Van Horn, 1971:471) menyebut enam karakteristik penting:

- (a) kompetensi dan jumlah staf,
- (b) tingkat kontrol hierarkis terhadap proses dan keputusan,
- (c) dukungan politik,
- (d) vitalitas organisasi,
- (e) keterbukaan komunikasi baik internal maupun eksternal, serta
- (f) hubungan formal dan informal dengan lembaga pembuat atau penegak kebijakan.

e. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik (*economic, social, and political conditions*)

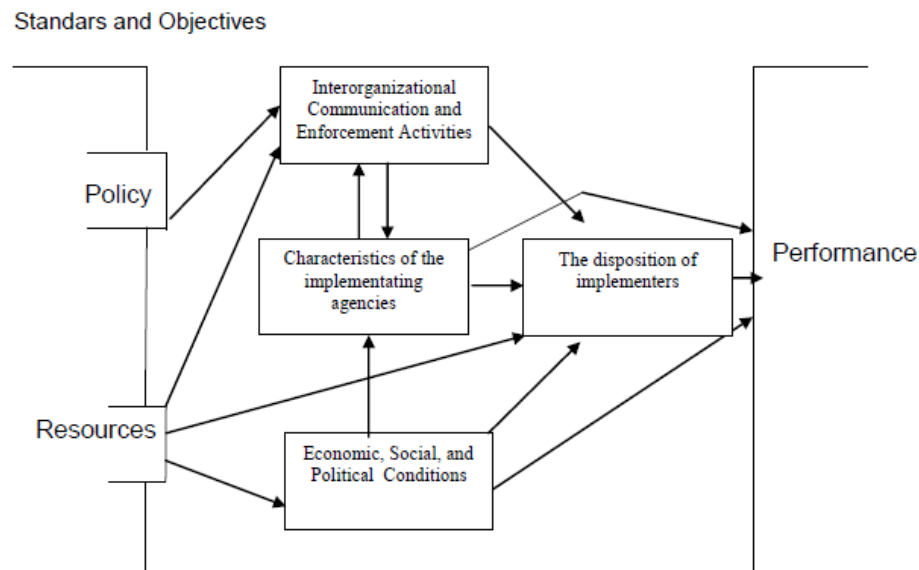
Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif sangat memengaruhi keberhasilan implementasi. Ketersediaan sumber daya ekonomi yang memadai, dukungan sosial dari kelompok sasaran, serta stabilitas politik akan memperbesar peluang keberhasilan kebijakan.

f. Disposisi pelaksana kebijakan (*Disposition of Implementors*)

Sikap dan orientasi pelaksana terhadap kebijakan juga memengaruhi implementasi. Tiga elemen utama yang menentukan disposisi ini adalah pemahaman terhadap kebijakan, sikap penerimaan atau penolakan, serta tingkat intensitas respons terhadap pelaksanaannya.

Untuk memperjelas keterkaitan-keterkaitan antara setiap komponen dalam model implementasi kebijakan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. Model Implemenasi Kebijakan Van Meter and Van Horn



Sumber: *Van Meter and Van Horn (1975 : 463) dalam (Kasmad, 2021)*

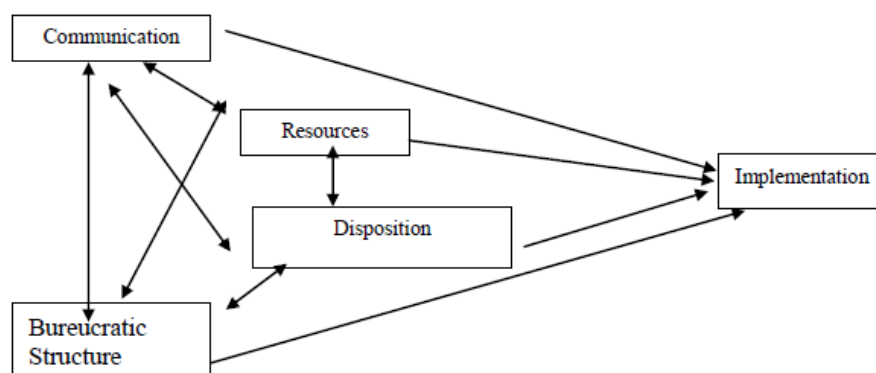
Model implementasi Van Meter dan Van Horn menyempurnakan kelemahan pendekatan *top-down* dengan menekankan kejelasan variabel dan hubungan antarvariabel yang memengaruhi implementasi kebijakan, seperti komunikasi antarorganisasi, kondisi ekonomi sosial politik, karakteristik lembaga pelaksana, dan disposisi pelaksana. Namun, model ini masih memiliki kelemahan berupa tumpang tindih antara indikator dan dimensi kinerja, di mana standar, tujuan kebijakan, dan sumber daya diposisikan sebagai variabel antara, sehingga menimbulkan potensi ambiguitas analisis.

3. Model George Edward III

George Edward III (1980:1) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah Lack of attention to implementation. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully*. Selanjutnya, Edward III (1980 : 148) menamakan model implementasi kebijakannya adalah “*direct and indirect impact on implementation*”. Dalam model memperlihatkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan, yaitu komunikasi dan struktur

birokrasi berpengaruh langsung dan tak langsung terhadap implementasi, sumber-sumber daya dan disposisi berpengaruh langsung terhadap implementasi kebijakan. Kemudian, di antara keempat faktor berpengaruh tersebut (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) terjadi hubungan timbal balik. Pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi kebijakan dan hubungan timbal balik di antara keempat faktor tersebut dapat divisualisasikan melalui model implementasi kebijakan. Berdasarkan model implementasi kebijakan Edward di bawah ini, bahwa kelebihan yang dimilikinya adalah kemampuannya menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi kebijakan yang tidak rumit. Kelemahannya adalah tidak mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor di luar organisasi pelaksana, birokrasi pemerintahan.

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Edward III



Sumber: Edward III, 1980 : 148, dalam (Kasmad, 2021)

2.4 Kebijakan Digitalisasi Pendidikan di Indonesia

Digitalisasi pendidikan di Indonesia merupakan strategi nasional untuk membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi. Salah satu inovasinya adalah peluncuran Rumah Pendidikan, super-aplikasi yang mengintegrasikan 986 layanan digital dalam delapan ruang utama, termasuk kemitraan dengan sektor swasta untuk memperkuat kompetensi guru dan memperkaya pembelajaran siswa (Antara, 2025; Sultra, 2025). Pemerintah juga menyalurkan bantuan digitalisasi ke lebih dari 300 ribu sekolah, meliputi perangkat keras, konten digital, serta integrasi kurikulum *coding* dan kecerdasan buatan guna

mempersiapkan peserta didik menghadapi era industri 4.0 dan *society* 5.0 (Indonesia.go.id, 2023).

Infrastruktur pendukung diperluas melalui distribusi *smartboard*, tablet, laptop, serta pemanfaatan *cloud computing* dan *Learning Management System* (LMS) untuk pembelajaran jarak jauh (Indonesia.go.id, 2023). Pada isi manajemen, platform seperti Sistem informasi pengadaan sekolah dan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah mempermudah pengadaan serta penyusunan anggaran sekolah dengan prinsip transparansi (Tirto.id, 2024) Peningkatan kapasitas SDM dilakukan lewat pelatihan guru berbasis digital, pembentukan tim teknologi di sekolah, dan program kolaboratif “Siswa Asuh Teknologi” (Sultra, 2025).

Aspek administrasi juga terdigitalisasi melalui penerapan ijazah elektronik sesuai Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024 (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2024a), sementara keberlanjutan kebijakan dijaga melalui penggunaan konsisten platform seperti PMM, Rapor Pendidikan, dan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah di seluruh daerah (Antara, 2025) Keamanan digital diperkuat lewat SAMAN (Sistem Kepatuhan Moderasi Konten) untuk mencegah peredaran konten ilegal yang merugikan peserta (Sultra, 2025). Sinergi infrastruktur, SDM, kurikulum, tata kelola, dan keamanan ini membentuk fondasi pendidikan modern yang relevan dan berkelanjutan.

2.4.1 Landasan Hukum dan Regulasi Penggunaan Teknologi Informasi di Sekolah

Penggunaan teknologi informasi di sekolah di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur fungsi, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan, termasuk kewajiban pemerintah menyediakan sarana pendidikan yang memadai. Dalam konteks perkembangan teknologi saat ini, dukungan tersebut mencakup penyediaan infrastruktur digital dan integrasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran (JIPP Nasional, 2024; Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Landasan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang membuka ruang

penerapan teknologi digital dalam kurikulum, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi di satuan pendidikan Pemerintah Republik Indonesia, 2021)

Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan mengatur pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar, yang menjadi pijakan awal bagi pengembangan sistem e-Rapor. Sistem ini kemudian diatur lebih teknis dalam Petunjuk Teknis e-Rapor Kurikulum 2013 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Regulasi ini menetapkan prosedur instalasi, penggunaan, integrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta kewajiban sekolah untuk menginput nilai siswa secara digital. Dengan demikian, E-Rapor tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem informasi pendidikan nasional yang dikelola pemerintah (Kemendikbud, 2024)

Pemerintah juga memperkuat kerangka hukum digitalisasi pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menjadi acuan penting dalam menjaga keamanan data siswa dan guru di seluruh platform pendidikan, termasuk e-Rapor. Regulasi ini mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi terhadap pelanggaran, sehingga penerapan teknologi pendidikan dapat berjalan dengan prinsip keamanan dan akuntabilitas (Pemerintah Republik Indonesia, 2022).

Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai program nasional, seperti distribusi perangkat *smartboard* pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025 kepada 21 sekolah percontohan, yang disertai pelatihan guru untuk memanfaatkannya secara optimal (Detik, 2025). Pemerintah juga merencanakan penerapan *smart classroom* di 315.000 satuan pendidikan secara bertahap, sejalan dengan visi digitalisasi kurikulum nasional (Liputan6, 2025). Di samping itu, inisiatif literasi digital terus digalakkan untuk membekali siswa dengan keterampilan menghadapi era kecerdasan buatan (AI) dan disrupsi teknologi (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2025)

Dengan demikian, landasan hukum dan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi di sekolah, termasuk e-Rapor, telah mencakup aspek

penyelenggaraan pendidikan, standar penilaian, perlindungan data pribadi, dan moderasi konten digital. Meski kerangka hukumnya cukup komprehensif, tantangan implementasi seperti kesenjangan infrastruktur, kapasitas guru, serta koordinasi antar lembaga masih perlu mendapat perhatian agar digitalisasi pendidikan dapat berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

2.4.2 Strategi Pemerintah dalam Penerapan *Education Technology*

Strategi pemerintah dalam penerapan *education technology* (*edtech*) di Indonesia dirancang untuk mempercepat transformasi pendidikan menuju sistem yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis data. Salah satu pendekatan utama adalah integrasi program *edtech* ke dalam kebijakan nasional Merdeka Belajar, yang bertujuan mengoptimalkan proses pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital secara sistematis. Strategi ini tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas guru, penyesuaian kurikulum, serta digitalisasi manajemen pendidikan (Kementerian PANRB, 2024).

Dalam ranah infrastruktur, pemerintah melaksanakan program penyediaan akses internet cepat, pengadaan perangkat smartboard, laptop, dan tablet untuk sekolah, serta pengembangan jaringan pusat data pendidikan yang terintegrasi. Penerapan smart classroom di 315.000 satuan pendidikan menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk membangun lingkungan belajar yang interaktif dan berbasis teknologi (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025). Strategi ini juga dibarengi dengan literasi digital bagi guru dan siswa untuk memastikan pemanfaatan perangkat secara efektif, etis, dan produktif.

Dalam manajemen pendidikan, pemerintah meluncurkan ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang terhubung dengan e-kinerja untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan secara (Indonesia, 2024). Selain itu, Platform Merdeka Mengajar (PMM) menyediakan modul pelatihan daring, sumber ajar digital, forum kolaborasi guru, dan integrasi penilaian kinerja (Sasaran Kinerja Pegawai, SKP). Langkah ini mendorong manajemen berbasis data dan mengurangi beban administratif guru, sehingga fokus dapat diarahkan pada kualitas pengajaran.

Dalam pengembangan kurikulum, pemerintah menginisiasi integrasi mata pelajaran *coding* dan *artificial intelligence* (AI) mulai tahun ajaran 2025/2026, dengan implementasi bertahap sesuai kesiapan infrastruktur (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta, 2025). Program ini diproyeksikan mampu meningkatkan keterampilan abad 21 seperti *computational thinking*, kreativitas, dan pemecahan masalah berbasis teknologi. Untuk memastikan pemerataan, strategi ini disertai program pelatihan guru serta penyediaan perangkat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Salah satu instrumen penting dalam strategi digitalisasi pendidikan adalah penerapan e-Rapor, yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan dan pelaporan hasil belajar siswa secara digital dan terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). e-Rapor memungkinkan guru menginput nilai, melakukan analisis capaian kompetensi, dan menyampaikan laporan hasil belajar kepada orang tua secara daring. Selain menghemat penggunaan kertas, sistem ini mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan berbasis data di tingkat sekolah maupun pemerintah pusat (Kemendikbudristek, 2024). Pemerintah memandang e-Rapor sebagai bagian dari big data pendidikan nasional yang dapat dimanfaatkan untuk memetakan capaian literasi dan numerasi secara real-time. Hal ini selaras dengan kebijakan asesmen nasional yang menekankan evaluasi mutu pendidikan berdasarkan capaian belajar, bukan sekadar kelulusan. Integrasi e-Rapor dengan platform merdeka belajar dan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah diharapkan membentuk ekosistem manajemen pendidikan berbasis teknologi yang menyeluruh.

Keberhasilan strategi transformasi digital pendidikan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru. Oleh karena itu, pelatihan teknis penggunaan E-Rapor dan aplikasi pendidikan digital lainnya dimasukkan ke dalam program pengembangan kompetensi berkelanjutan sebagai bagian dari strategi nasional yang meliputi penyediaan infrastruktur, penguatan kapasitas guru, penyesuaian kurikulum, serta digitalisasi manajemen pendidikan. Pendekatan ini memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga terimplementasi secara efektif di ruang kelas. Melalui penerapan teknologi pendidikan, termasuk E-Rapor, pemerintah menargetkan

terbentuknya sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi global, sekaligus mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung visi Indonesia Digital 2045.

2.5 Konsep E-Rapor

2.5.1 Definisi dan Fungsi E-Rapor

Rapor merupakan dokumen resmi yang memuat laporan capaian hasil belajar peserta didik, meliputi nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sebagai bentuk pertanggungjawaban guru kepada orang tua dan masyarakat. Penyelenggaraan penilaian ini memiliki dasar hukum yang kuat, salah satunya Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, yang menegaskan bahwa penilaian harus dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil belajar secara sistematis (Kemendikbud, 2016). Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Direktorat SMA mengembangkan e-Rapor, aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Aplikasi ini memudahkan guru dalam mengolah dan melaporkan nilai secara cepat, akurat, dan sesuai standar, baik pada sekolah pelaksana Kurikulum 2013 sistem paket maupun SKS. Melalui e-Rapor, guru dapat menginput nilai pengetahuan, keterampilan, sikap, ekstrakurikuler, absensi, serta catatan wali kelas, yang kemudian secara otomatis tersusun menjadi laporan capaian kompetensi siswa dan tersinkronisasi dengan Dapodik, sehingga mengurangi kebutuhan input data ganda (Direktorat SMA, 2023)

Pengembangan e-Rapor merujuk pada sejumlah regulasi, di antaranya Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan, Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta panduan teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA tahun 2015. Dengan dasar regulasi tersebut, e-Rapor diharapkan mampu menjawab kompleksitas penilaian pada Kurikulum 2013 yang mencakup banyak aspek, sekaligus meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Keberadaan sistem ini tidak hanya membantu guru dalam pelaporan, tetapi juga memastikan nilai akhir siswa dapat ditelusuri asal-usulnya, sehingga memperkuat

akuntabilitas dan keandalan sistem informasi pendidikan nasional (dan Kebudayaan, 2015, 2016; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016)

2.5.2 Proses Penggunaan E-Rapor

Penggunaan e-Rapor berbasis web merupakan salah satu inovasi dalam digitalisasi pendidikan yang bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi penilaian, serta akurasi data hasil belajar peserta didik. Implementasi e-Rapor memerlukan perencanaan matang, pengelolaan sumber daya yang efektif, serta peran strategis wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai koordinator pelaksana. Hal ini sejalan dengan pandangan (Handoko, 2016) mengenai fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang dalam konteks pendidikan menjadi kerangka untuk mengelola inovasi digital seperti e-Rapor.

Proses implementasi e-Rapor umumnya meliputi empat tahapan utama, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)

Tahap ini menentukan arah dan keberhasilan pelaksanaan. Kegiatan meliputi:

- a. Menetapkan tujuan dan standar penggunaan e-Rapor (efisiensi administrasi, transparansi nilai, akses mudah bagi orang tua). Mengidentifikasi Kebutuhan,
- b. Identifikasi kebutuhan infrastruktur (perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet) dan pelatihan SDM.
- c. Penetapan aturan dan prosedur operasional, seperti jadwal input nilai dan tata cara akses aplikasi. Pedoman ini memberikan panduan yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat (Kemendikbud, 2016).

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Tahap pengorganisasian ini erfokus pada pengelolaan sumber daya manusia dan material melalui. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini:

- a. Membentuk Tim Pengelola yang terdiri dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum, staf IT, guru, dan tenaga administrasi.

- b. Pelatihan guru dan staf dalam penginputan data, pengolahan nilai, dan pencetakan rapor. Pelatihan mencakup penginputan nilai, pengolahan data, dan pencetakan rapor.
 - c. Persiapan infrastruktur teknologi yang mendukung akses aplikasi.
 - d. Pemantauan kinerja tim oleh pimpinan sekolah.
3. Pelaksanaan (*Actuating*)
- Pada tahap ini, e-Rapor mulai digunakan secara aktif. Beberapa langkah dalam tahap pelaksanaan meliputi:
- a. Guru menginput data nilai pengetahuan, keterampilan, sikap, kehadiran, ekstrakurikuler, dan catatan wali kelas, yang terintegrasi dengan dapodik.
 - b. Sistem mengolah data secara otomatis menjadi nilai akhir dan deskripsi kompetensi..
 - c. Pihak terkait (guru, kepala sekolah, siswa, orang tua) dapat mengakses data secara daring.
 - d. Rapor dicetak setelah data diverifikasi (Direktorat SMA, 2023).
4. Pengawasan (*Controlling*)
- Pengawasan dilakukan untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan rencana. Berikut adalah langkah-langkah pengawasan:
- a. Evaluasi berkala terhadap akurasi data, kelancaran proses input, dan kepuasan pengguna.
 - b. Penanganan masalah teknis dan keluhan pengguna.
 - c. Pengumpulan umpan balik untuk perbaikan layanan.
 - d. Pembaruan sistem berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengguna.

Dengan penerapan fungsi manajemen yang terencana dan terintegrasi, penggunaan e-Rapor memiliki landasan yang kuat untuk diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Sinergi antara tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan memungkinkan sistem ini dioperasikan secara sistematis serta adaptif terhadap kebutuhan satuan pendidikan. Melalui pengelolaan yang baik, e-Rapor berperan dalam memperkuat konsistensi praktik penilaian antarpendidik, meningkatkan keandalan data hasil belajar, serta memfasilitasi alur informasi yang lebih cepat dan akurat. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya tata kelola penilaian yang lebih akuntabel dan responsif, sehingga e-Rapor tidak hanya

berfungsi sebagai sarana digitalisasi administrasi, tetapi juga sebagai pendukung pengambilan keputusan pendidikan yang berbasis data dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan. (Agustino, 2021).

2.5.3 Prosedur E-Rapor

Penggunaan e-Rapor di sekolah memerlukan prosedur yang terstruktur untuk memastikan setiap tahap pengelolaan nilai berjalan sesuai standar penilaian pendidikan dan prinsip akuntabilitas data. Tanpa mekanisme yang jelas, risiko terjadinya kesalahan input, keterlambatan publikasi nilai, serta ketidaksesuaian dengan regulasi akan meningkat. Oleh karena itu, penyusunan prosedur e-Rapor bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, karena mempengaruhi kualitas pelaporan hasil belajar siswa, kelancaran komunikasi dengan orang tua, dan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas sekolah.

Secara umum, prosedur penggunaan e-Rapor dapat dibagi ke dalam 5 tahap utama, yaitu:

1. Tahap persiapan sistem

Tahap ini merupakan fondasi awal sebelum e-Rapor digunakan. Aktivitas yang dilakukan meliputi:

a. Instalansi Aplikasi

Aplikasi e-Rapor diunduh dari situs resmi Kemendikbud sesuai jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK) dan diinstal pada perangkat server sekolah. Proses instalasi harus memperhatikan kompatibilitas perangkat keras dan lunak, termasuk spesifikasi minimal prosesor, kapasitas RAM, dan sistem operasi yang didukung.

b. Konfigurasi Awal

Setelah instalasi, dilakukan pengaturan identitas sekolah (nama, NPSN, alamat, dan logo) serta sinkronisasi data dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sinkronisasi ini bertujuan memastikan seluruh data guru, siswa, mata pelajaran, dan rombongan belajar sudah akurat dan mutakhir.

c. Pengaturan Pengguna

Administrator sekolah membuat akun pengguna sesuai struktur organisasi: akun admin untuk operator sekolah, akun guru mata pelajaran, akun wali

kelas, serta akun kepala sekolah. Setiap akun diberikan hak akses berbeda sesuai perannya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

2. Tahap Pengisian Nilai

Tahap ini berfokus pada input data hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru mata pelajaran.

a. Input Nilai Harian dan Ujian

Guru mengisi nilai berdasarkan hasil penilaian pengetahuan (tes tulis, lisan, dan penugasan), keterampilan (praktik, proyek, portofolio), serta sikap (observasi perilaku, jurnal guru, dan penilaian diri). Sistem e-Rapor menyediakan format input manual dan impor otomatis dari file Excel untuk efisiensi.

b. Validasi Nilai

Sebelum dikirim ke wali kelas, guru wajib memeriksa keakuratan nilai agar tidak terjadi kesalahan entri. Proses validasi ini termasuk pengecekan kesesuaian nilai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan kelengkapan deskripsi capaian kompetensi.

3. Tahap Verifikasi dan Rekapitulasi

Tahap ini bertujuan memastikan semua data nilai dan informasi siswa sudah lengkap dan benar.

a. Wali Kelas

Wali kelas menggabungkan seluruh nilai dari berbagai guru mata pelajaran dan menambahkan informasi non-akademik, seperti kehadiran, catatan ekstrakurikuler, dan prestasi.

b. Guru Bimbingan Konseling (BK)

Apabila tersedia, guru BK menginput catatan perkembangan sikap, hasil konseling, dan rekomendasi pembinaan siswa.

c. Kepala Sekolah

Kepala sekolah melakukan pemeriksaan akhir sebelum rapor dipublikasikan, termasuk memverifikasi format, tanda tangan digital, dan kesesuaian dengan regulasi.

4. Tahap Pencetakan dan Distribusi

Tahap ini merupakan proses publikasi hasil belajar kepada orang tua/wali siswa

a. Pencetakan Rapor

E-Rapor menghasilkan dokumen dalam format PDF yang siap dicetak. Format ini mencakup identitas siswa, nilai, deskripsi capaian kompetensi, catatan wali kelas, dan tanda tangan kepala sekolah.

b. Distribusi ke Orang Tua/Wali

Sekolah dapat membagikan rapor dalam bentuk cetak atau softcopy. Beberapa sekolah memanfaatkan *portal daring* untuk mempermudah orang tua mengunduh rapor secara mandiri, sehingga distribusi lebih cepat dan efisien.

5. Tahap Arsip dan Pelaporan

Tahap ini memastikan data Nilai siswa terdokumentasi dan dapat diakses kembali jika dibutuhkan.

a. Arsip Digital

Seluruh file rapor disimpan dalam sistem e-Rapor atau server sekolah untuk keperluan dokumentasi dan audit pendidikan di masa depan.

b. Pelaporan ke Dinas Pendidikan

Data hasil belajar dapat diekspor dan dikirim ke dinas pendidikan atau pengawas sekolah sesuai prosedur yang berlaku. Pelaporan ini mendukung proses evaluasi mutu pendidikan dan perencanaan kebijakan pendidikan di tingkat daerah maupun nasional.

2.5.4 Mekanisme Kerja sistem e-Rapor

Mekanisme kerja sistem e-Rapor merupakan manajemen penilaian berbasis web yang terintegrasi penuh dengan data pokok pendidikan. Berbeda dengan aplikasi penilaian yang berdiri sendiri, e-Rapor dirancang sebagai instrumen kebijakan yang tidak dapat berfungsi tanpa adanya basis data dari Dapodik (Direktorat SMA, 2023). Mekanisme ini memastikan bahwa seluruh data yang digunakan melalui dari profil satuan pendidikan, data pendidik, data peserta didik, hingga rombongan belajar bersumber dari satu pintu data nasional yang valid dan mutakhir. Secara teknis, mekanisme sistem e-Rapor bekerja melalui alur integrasi dan pertukaran data yang diatur berdasarkan hak akses pengguna (*user privilege*). Sebagaimana dijelaskan dalam panduan teknis, terdapat tiga peran utama dalam sistem ini, yaitu

Administrator, Guru Mata pelajaran dan Wali Kelas (Kemendikbudristek, 2022). Alur kerja sistem berjalan secara berurutan, di mana tahap selanjutnya tidak dapat diproses jika tahap sebelumnya belum diselesaikan.

Secara rinci, mekanismen kerja e-Rapor dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi Data Awal (Administrator)

Mekanismen sistem dimulai oleh administrator yang bertugas menyiapkan basis data. Admin melakukan sinkronisasi data untuk menarik referensi dari server Dapodik lokal ke dalam e-Rapor. Data ini meliputi profil sekolah, data guru, data pelajar, dan data pemetaan kelas. Tanpa inisiasi sinkronisasi dari Admin, guru, dan wali kelas tidak dapat mengakses sistem karena data referensi tidak tersedia (Direktorat SMA, 2023).

2. Input dan Validasi Nilai (Guru Mata Pelajaran)

Setelah basis data tersedia, guru mata pelajaran melakukan *login* untuk merencanakan dan menginput penilaian. Guru memasukkan nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran. Mekanismen kunci pada tahap ini adalah kirim nilai. Setelah seluruh nilai dan deskripsi capaian kompetensi terisi, guru wajib melakukan pengiriman data agar nilai terkunci dan dapat dibaca oleh sistem akun wali kelas.

3. Pengolahan Akhir dan pelaporan (Wali Kelas)

Mekanismen berlanjut ke tahap pengolahan akhir oleh wali kelas. Sistem akan merekap seluruh nilai yang dikirim oleh guru mata pelajaran. Wali Kelas bertugas memeriksa kelengkapan nilai, kemudian menambahkan data non akademik seperti kehadiran, ekstrakurikuler, dan catatan perkembangan karakter. Jika seluruh komponen lengkap, sistem akan memproses hitung nilai akhir secara otomatis dan menghasilkan dokumen rapor yang siap dicetak dan ditandatangani.

2.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai panduan konseptual untuk memberikan arah analisis yang sistematis terhadap implementasi digitalisasi kebijakan pendidikan

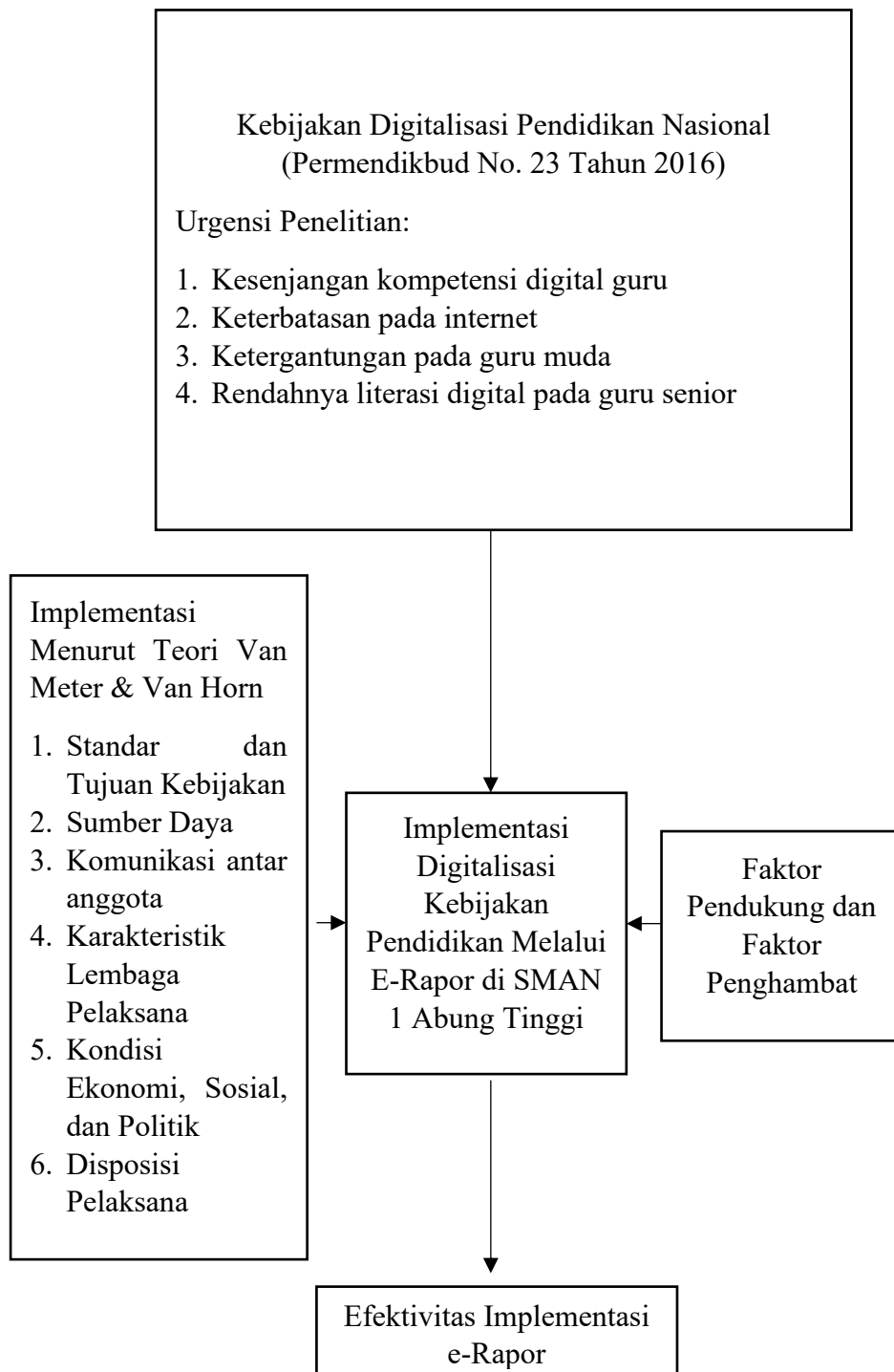
melalui e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi. Penelitian ini berpijak pada kebijakan nasional terkait digitalisasi pendidikan, khususnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan serta kebijakan Merdeka Belajar, yang menekankan pentingnya transformasi sistem penilaian menuju mekanisme berbasis digital yang objektif, akuntabel, dan transparan. Kebijakan tersebut menjadi dasar normatif bagi sekolah dalam mengadopsi e-Rapor sebagai instrumen penilaian resmi, sekaligus sebagai upaya peningkatan mutu tata kelola pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis utama untuk memahami dinamika pelaksanaan e-Rapor di tingkat sekolah. Model ini menekankan enam faktor penentu implementasi, yaitu standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi pelaksana kebijakan. Keenam faktor tersebut dipandang saling berkaitan dan berpengaruh secara simultan dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, model Van Meter dan Van Horn digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kendala, serta kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik implementasi e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi.

Secara konseptual, penelitian ini memandang bahwa implementasi e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem digital dan regulasi yang mengaturnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kesiapan aktor pelaksana di tingkat sekolah. Kompetensi guru dalam literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah perdesaan, sikap serta tingkat penerimaan pendidik terhadap kebijakan, dan dukungan kelembagaan dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan menjadi faktor penting yang membentuk keberhasilan implementasi. Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan kausal antara kebijakan nasional sebagai input, faktor-faktor implementasi sebagai proses, dan hasil implementasi berupa peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi penilaian pendidikan sebagai output yang diharapkan.

Kerangka pemikiran ini menjadi pijakan dalam penyusunan instrumen penelitian dan analisis data, sehingga diharapkan mampu menghasilkan temuan yang relevan dan bermanfaat, baik secara akademis dalam pengembangan teori implementasi kebijakan pendidikan, maupun secara praktis bagi penguatan digitalisasi pendidikan di sekolah perdesaan. Adapun pedoman dalam mempermudah kegiatan penelitian ini dan juga menganalisis hasil penelitian, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2. Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian, yaitu menggambarkan secara mendalam implementasi digitalisasi kebijakan pendidikan melalui e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami proses, konteks, serta dinamika pelaksanaan kebijakan sebagaimana terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif menekankan pada pemaknaan terhadap pengalaman dan pandangan aktor yang terlibat, sehingga mampu menangkap realitas sosial secara komprehensif tanpa melakukan manipulasi variabel maupun pengujian hipotesis. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai tepat untuk mengungkap berbagai faktor yang memengaruhi implementasi e-Rapor secara kontekstual dan faktual.

Menurut (Hardani et al., 2020) penelitian kualitatif deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang holistik mengenai suatu peristiwa dengan menggunakan data berupa kata-kata, dokumen, maupun tindakan nyata, bukan angka statistik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret prosedur teknis penggunaan e-Rapor, tetapi juga mengungkap hambatan implementasi, strategi adaptasi yang dilakukan guru dan tenaga kependidikan, serta respon warga sekolah terhadap kebijakan digitalisasi pendidikan. Pemilihan pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan realitas secara kontekstual, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai praktik digitalisasi pendidikan di wilayah perdesaan.

3.2 Fokus Penelitian

Implementasi digitalisasi kebijakan pendidikan melalui e-Rapor di sekolah menengah atas merupakan fenomena penting dalam konteks transformasi pendidikan nasional. Penerapan e-Rapor tidak sekadar menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga mengandung dimensi kebijakan publik yang kompleks, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, dan dukungan kelembagaan. Kondisi SMAN 1 Abung Tinggi sebagai sekolah di wilayah perdesaan menghadirkan tantangan khusus, seperti keterbatasan akses internet, kesenjangan literasi digital antar-tenaga pendidik, serta ketergantungan pada guru muda yang lebih adaptif terhadap teknologi. Situasi ini menjadikan penelitian mengenai implementasi e-Rapor di sekolah tersebut memiliki urgensi akademis maupun praktis, karena dapat memperlihatkan sejauh mana kebijakan digitalisasi pendidikan dapat diimplementasikan secara merata di berbagai konteks sosial.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada Implementasi Digitalisasi Kebijakan Pendidikan Melalui E-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi yang terdiri dari 2 point utama yaitu:

1. Implementasi Digitalisasi Kebijakan Pendidikan Melalui E-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Model ini dipilih karena menyediakan enam variabel analisis yang komprehensif dalam mengkaji proses implementasi kebijakan publik. Adapun fokus penelitian ini mencakup:

- a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan menjadi titik tolak dalam melihat sejauh mana sekolah memahami arah kebijakan nasional, khususnya Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan serta program *Merdeka Belajar*. Pada konteks SMAN 1 Abung Tinggi, penting untuk menelaah apakah tujuan kebijakan berupa peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penilaian benar-benar dipahami oleh guru dan tenaga kependidikan, serta apakah kebijakan tersebut dapat diterjemahkan secara konsisten dalam praktik penggunaan e-Rapor.

b. Sumber Daya

Sumber daya sangat krusial dalam implementasi. Di SMAN 1 Abung Tinggi, keterbatasan komputer, akses internet yang tidak stabil, serta rendahnya literasi digital sebagian guru menjadi faktor yang perlu dianalisis secara mendalam. Selain itu, dukungan berupa pelatihan maupun pendampingan dari Dinas Pendidikan Lampung Utara juga menentukan sejauh mana sumber daya yang tersedia dapat mengoptimalkan pemanfaatan e-Rapor.

c. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi juga akan diteliti, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Komunikasi internal mencakup interaksi antara kepala sekolah, guru, dan staf dalam mengelola penggunaan e-Rapor. Sementara komunikasi eksternal merujuk pada pola koordinasi dengan Dinas Pendidikan Lampung Utara, termasuk terkait instruksi teknis dan mekanisme pelaporan. Hambatan komunikasi dapat berdampak langsung pada keterlambatan maupun kesalahan input data sehingga memengaruhi efektivitas implementasi.

d. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Karakteristik di sekolah juga memainkan peran penting. Kepala sekolah berfungsi sebagai pengambil keputusan yang memberikan arahan kebijakan, guru menjadi pelaksana utama dalam penginputan nilai, sementara staf administrasi bertugas memastikan sinkronisasi data dengan Dapodik. Penelitian ini akan menelaah bagaimana peran masing-masing pihak tersebut dijalankan, apakah terjadi pembagian kerja yang jelas atau justru tumpang tindih, serta bagaimana kesiapan organisasi sekolah dalam menerima inovasi digital.

e. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupi SMAN 1 Abung Tinggi sebagai sekolah di wilayah pedesaan juga turut memengaruhi keberhasilan implementasi e-Rapor. Keterbatasan infrastruktur internet, dukungan masyarakat yang masih terbatas, serta kondisi ekonomi yang berimplikasi pada ketersediaan perangkat TIK menjadi faktor eksternal

yang harus dipertimbangkan. Selain itu, kebijakan daerah dalam pengalokasian anggaran pendidikan digital turut menentukan apakah sekolah mendapatkan dukungan berkelanjutan dalam menerapkan sistem ini.

f. Disposisi Pelaksana Kebijakan

Disposisi menyangkut sikap, komitmen, dan penerimaan guru serta tenaga kependidikan terhadap e-Rapor. Kondisi di SMAN 1 Abung Tinggi menunjukkan adanya perbedaan disposisi, di mana guru muda lebih cepat beradaptasi sementara guru senior cenderung menghadapi kendala dalam penggunaan teknologi. Analisis ini penting untuk melihat apakah implementasi berjalan karena adanya dorongan dari sebagian kecil guru, ataukah sudah menjadi kesadaran kolektif seluruh tenaga pendidik.

2. Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi

3.3 Lokus Penelitian

Lokus penelitian ditetapkan di SMAN 1 Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara. Sekolah ini dipilih karena telah menerapkan sistem e-rapor secara konsisten sebagai bagian dari kebijakan digitalisasi pendidikan. Selain itu, SMAN 1 Abung Tinggi termasuk salah satu sekolah rujukan di wilayahnya dalam transformasi teknologi informasi pendidikan, sehingga pengalaman dan praktik implementasi e-rapor di sekolah ini dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai efektivitas kebijakan digitalisasi pendidikan. Pemilihan lokus ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa keberhasilan maupun kendala yang dihadapi sekolah rujukan akan berimplikasi lebih luas bagi sekolah-sekolah lain di sekitarnya, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan berbasis digital.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif memiliki peran sentral dalam menentukan kedalaman dan keabsahan informasi yang diperoleh. Menurut (Sugiyono, 2022), sumber data dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan atau partisipan penelitian. Sumber primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2022). Melalui wawancara mendalam, observasi, dan interaksi langsung dengan para informan, peneliti dapat menggali pemahaman yang autentik mengenai implementasi digitalisasi kebijakan pendidikan di SMAN 1 Abung Tinggi.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang tidak diberikan secara langsung oleh informan, melainkan melalui perantara atau dokumen tertulis. Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi seperti pedoman penggunaan e-rapor yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, arsip nilai siswa, laporan internal sekolah, serta regulasi terkait digitalisasi pendidikan. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data primer, sehingga analisis yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan valid.

3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Pemilihan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu berdasarkan relevansi dan kedalaman informasi yang dapat diberikan. Menurut (Sugiyono, 2022), purposive sampling adalah teknik penentuan sumber data dengan pertimbangan khusus, yakni orang yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang sedang diteliti.

Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan keterlibatannya dalam implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan melalui penggunaan e-rapor di SMAN 1 Abung Tinggi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni penentuan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, khususnya mereka yang memiliki pemahaman mendalam

dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, informan penelitian ini meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, operator e-rapor, guru mata pelajaran, wali kelas perwakilan dari tingkat X dan XII, pengawas sekolah, serta perwakilan wali murid. Adapun informan penelitian meliputi:

Tabel 3. Informan Penelitian

NO	Nama	Keterangan
1	Johan Supangkat, M.M, MPd	Pengawas Manejerial Cabdin Pendidikan Wilyah IV Provinsi Lampung
2	Triyanto, S.Ag, M.M	Kepala Sekolah SMAN 1 Abung Tinggi
3	Agus Mawarzi, S.Pd	Waka Kurikulum SMAN 1 Abung Tinggi
4	Tumiyanto Dumayanti, S.Kom	Operator SMAN 1 Abung Tinggi
5	Lusi Diani, S.Pd	Wali Kelas X SMAN 1 Abung Tinggi
6	Yuliza Andriyani, S.Pd	Wali Kelas XII SMAN 1 Abung Tinggi
7	Tina Puspita, S.Pd	Guru Mata Pelajaran SMAN 1 Abung Tinggi
8	Neliyar, S.Pd.I	Guru Mata Pelajaran SMAN 1 Abung Tinggi
9	Dewi	Wali Murid Kelas XII
10	Sarul	Wali Murid Kelas XII

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan aspek yang sangat penting dalam penelitian, sebab kualitas hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Hal ini sejalan dengan (Sugiyono, 2022) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi,

yang saling melengkapi untuk memperoleh data yang lebih komprehensif serta mendalam melalui proses triangulasi.

1. Observasi

Observasi dipahami sebagai teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena atau objek penelitian. Menurut (Sugiyono, 2022), menjelaskan bahwa observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan observasi langsung, di mana peneliti hadir di SMAN 1 Abung Tinggi untuk menyaksikan secara nyata pelaksanaan e-rapor. Fokus observasi diarahkan pada guru saat melakukan input nilai, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan dukungan infrastruktur lain. Hasil pengamatan dicatat secara rinci dalam catatan lapangan (*field notes*) dan diperkuat dengan dokumentasi visual berupa foto untuk memberikan gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan di sekolah tersebut.

2. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2022), wawancara adalah “teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang lebih detail. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur, yakni dengan menggunakan pedoman pertanyaan pokok namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara mendalam sesuai pengalaman dan pandangan mereka. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan melibatkan sejumlah informan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses wawancara dilengkapi dengan instrumen berupa panduan wawancara, alat tulis, serta perangkat perekam suara. Data hasil wawancara kemudian ditranskrip, dikategorikan, dan dianalisis untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai implementasi digitalisasi kebijakan pendidikan melalui e-rapor.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan peristiwa masa lalu. Menurut (Sugiyono, 2022) menyebutkan bahwa dokumentasi adalah rekaman peristiwa masa lalu yang dapat berbentuk tulisan,

gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Sumber dokumentasi meliputi pedoman resmi penggunaan e-rapor yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, arsip nilai siswa, laporan internal sekolah terkait implementasi e-rapor, serta foto dan rekaman kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan digitalisasi pendidikan. Dokumentasi dipandang penting karena dapat memberikan bukti empiris, memperkuat validitas hasil penelitian, serta melengkapi data primer yang diperoleh dari informan di lapangan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang sangat penting untuk mengolah data lapangan sehingga menghasilkan temuan yang bermakna. Menurut (Sugiyono, 2022), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif bukan hanya sekadar merangkum, tetapi juga menafsirkan makna yang terkandung di dalam data.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara interaktif, berlangsung terus-menerus, dan berulang sejak pengumpulan data dimulai hingga penelitian selesai. (Sugiyono, 2022), menjelaskan bahwa analisis data kualitatif mengikuti langkah-langkah yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu dicatat secara rinci. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada aspek yang penting, dan mencari tema serta pola. Dengan demikian, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, atau sejenisnya. Penyajian data ini bertujuan agar peneliti dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian secara lebih terstruktur.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan didukung oleh data valid dan konsisten di lapangan, maka kesimpulan tersebut bersifat kredibel.

Pemilihan model Miles dan Huberman dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa implementasi kebijakan publik, khususnya digitalisasi pendidikan melalui e-Rapor, menghasilkan data yang kompleks dan multidimensional. Implementasi di SMAN 1 Abung Tinggi melibatkan banyak aktor (kepala sekolah, guru, staf administrasi, hingga Dinas Pendidikan), dipengaruhi kondisi infrastruktur pedesaan, serta berhubungan dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, analisis data tidak hanya dimaksudkan untuk mengorganisasi informasi, tetapi juga menafsirkan dinamika interaksi antar aktor, hambatan, dan faktor pendukung implementasi. Berdasarkan tahapan tersebut, analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan direduksi agar fokus pada aspek yang penting, kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, dan akhirnya diverifikasi untuk ditarik kesimpulan yang valid mengenai implementasi digitalisasi kebijakan pendidikan melalui e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin tingkat kepercayaan (*trustworthiness*) dari hasil penelitian. Menurut (Sugiyono, 2022), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi

uji kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*).

Berdasarkan pandangan tersebut, penelitian ini menggunakan empat uji utama sebagai berikut:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan di lapangan. (Sugiyono, 2022) menegaskan bahwa kredibilitas dapat diuji melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, serta *member check*. Dalam penelitian ini, kredibilitas dijaga melalui perpanjangan keterlibatan peneliti di SMAN 1 Abung Tinggi, peningkatan ketekunan pengamatan, serta penerapan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan tiga pendekatan: (a) triangulasi teknik, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; (b) triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan pihak Dinas Pendidikan; serta (c) triangulasi waktu, yakni mengulang pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi. Selain itu, *member check* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali temuan kepada informan kunci agar sesuai dengan fakta lapangan.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau ditransfer ke konteks lain. Menurut (Sugiyono, 2022) transferabilitas dapat dicapai apabila peneliti menyajikan deskripsi yang rinci, jelas, sistematis, dan mendetail tentang konteks penelitian. Dalam penelitian ini, transferabilitas dijaga dengan cara mendeskripsikan secara lengkap latar penelitian, karakteristik SMAN 1 Abung Tinggi, kondisi sosial-budaya masyarakat sekitar, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi e-Rapor. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi sekolah lain di wilayah pedesaan dengan kondisi serupa.

3. Depandability (*Depandability*)

Dependabilitas berhubungan dengan konsistensi penelitian, yaitu sejauh mana proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dependabilitas dapat diuji

melalui audit terhadap seluruh proses penelitian (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, dependabilitas dijaga dengan cara mencatat setiap tahapan penelitian secara sistematis, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Dokumentasi lengkap, termasuk pedoman wawancara, transkrip data, serta catatan observasi, disiapkan agar dapat diperiksa ulang oleh dosen pembimbing atau pihak lain yang berkompeten.

4. Konfirmabilitas (*Comfirbility*)

Konfirmabilitas berkaitan dengan objektivitas hasil penelitian. Menurut (Sugiyono, 2022), konfirmabilitas menghendaki agar temuan penelitian benar-benar didasarkan pada data lapangan dan bukan hasil rekayasa peneliti. Dalam penelitian ini, konfirmabilitas dijaga dengan menyajikan bukti data lapangan secara transparan, menyertakan kutipan wawancara asli, serta mendokumentasikan sumber data secara lengkap agar dapat ditelusuri kebenarannya.

Dengan penerapan keempat uji keabsahan data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, baik dari sisi ketepatan, data maupun konsistensi proses penelitian. Uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas saling melengkapi dalam memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar merefleksikan kondisi empiris di lapanga, dapat dijadikan rujukan pada konteks yang sebanding, serta terbebas dari bias subjektivitas peneliti. Dengan demikian, temuan penelitian ini memiliki landasan metodologis yang kuat untuk menjelaskan implementasi digitalisasi kebijakan pendidikan melalui e-Rapor di SMAN 1 abung Tinggi secara objektif dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi digitalisasi kebijakan pendidikan melalui e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Rapor telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut kebijakan nasional digitalisasi pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Implementasi e-Rapor menunjukkan adanya pergeseran dari sistem penilaian manual menuju sistem penilaian berbasis digital, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih berada pada tahap transisi. Adapun kesimpulan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1) Implementasi Digitalisasi Kebijakan Pendidikan Melalui e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi

a) Standar dan Tujuan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, standar dan tujuan kebijakan e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi memang telah mengacu (memenuhi aspek) pada kebijakan nasional digitalisasi pendidikan, khususnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan serta pedoman teknis e-Rapor dari Kemendikbudristek. Sekolah telah menggunakan aplikasi e-Rapor yang terintegrasi dengan Dapodik sesuai ketentuan. Namun, secara substantif, implementasi ini gagal mencapai tujuannya karena pemahaman guru yang masih terbatas. Dimana e-Rapor hanya dianggap sebagai kewajiban administratif akhir semester, bukan sebagai instrumen untuk meningkatkan

mutu pembelajaran. Sesuai dengan teori Van Mater dan Van Horn, ketidakjelasan pemahaman guru terhadap esensi kebijakan ini menyebabkan implementasi dilapangan menjadi rendah dan sekedar formalitas. Dengan demikian, meskipun secara administrasi sudah sesuai standar nasional, secara praktis kebijakan e-Rapor di sekolah ini kurang berjalan optimal karena gagal mengubah pola kerja guru ke arah digitalisasi pendidikan yang sesungguhnya.

b) Sumber Daya

Dari aspek sumber daya, implementasi e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi ditemukan tidak berjalan optimal. Meskipun jumlah guru mencukupi secara kuantitas, namun secara kualitas terdapat hambatan serius pada kompetensi TIK (kemampuan mengoperasikan perangkat digital) dan literasi digital (kemampuan memahami sistem data) guru, terutama di kalangan senior. Hal ini menyebabkan terjadinya ketergantungan yang timpang pada operator sekolah sebagai satu-satunya tumpuan teknis, sehingga beban kerja tidak terbagi secara merata. Selain itu, keterbatasan sumber daya fisik seperti jaringan internet yang tidak stabil dan kurangnya perangkat komputer, ditambah ketiadaan anggaran khusus, menjadi faktor utama kegagalan kebijakan ini. Sesuai teori Van Meter dan Van Horn, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas ini secara langsung menghambat proses input data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-Rapor belum efektif karena kurangnya kesiapan sarana prasarana serta kesenjangan kemampuan teknologi di antara pelaksana kebijakan.

c) Komunikasi Antarorganisasiasil

penelitian menunjukkan bahwa alur komunikasi antarorganisasi, baik dengan pihak eksternal maupun internal, masih menghadapi kendala serius. Secara eksternal, instruksi dari Dinas Pendidikan sering kali bersifat mendadak dan kurang disertai sosialisasi yang mendalam, sehingga sekolah mengalami kesulitan dalam merespons pembaruan sistem secara cepat. Di lingkup internal, koordinasi antar-pelaksana cenderung dilakukan secara nonformal tanpa dokumentasi kebijakan yang

kuat, yang mengakibatkan prosedur pelaksanaan di lapangan menjadi kurang seragam. Selain itu, belum adanya langkah sosialisasi yang terukur kepada wali murid membuat fungsi transparansi e-Rapor tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat sasaran. Merujuk pada teori Van Meter dan Van Horn, kondisi ini menunjukkan adanya hambatan komunikasi yang memicu distorsi informasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi belum mencapai efektivitas yang diharapkan karena pesan kebijakan tidak tersampaikan secara utuh dari tingkat pusat hingga ke orang tua siswa.

d) Karakteristik Lembaga Pelaksana

Secara kelembagaan, SMAN 1 Abung Tinggi memang telah memiliki struktur organisasi resmi. Namun, dalam pelaksanaan e-Rapor, sekolah gagal membentuk perangkat kerja yang jelas. Tidak adanya Surat Keputusan (SK) Tim e-Rapor maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis membuat pembagian tugas menjadi berantakan dan terjadi tumpang tindih peran antar-guru. Akibatnya, pelaksanaan program tidak bisa berjalan mandiri karena selalu bergantung pada arahan pimpinan. Temuan ini sangat sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn, yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh karakteristik organisasi pelaksana. Karena sekolah tidak memiliki mekanisme kerja yang teratur, maka organisasi menjadi tidak stabil dalam menjalankan aturan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-Rapor di sekolah ini tidak efektif karena lemahnya manajemen internal dan tidak adanya aturan kerja yang sistematis.

e) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di SMAN 1 Abung Tinggi menjadi penghambat utama keberhasilan e-Rapor. Dari sisi sosial dan ekonomi, rendahnya literasi digital serta keterbatasan finansial masyarakat perdesaan membuat wali murid kesulitan mengakses sistem penilaian digital. Sementara dari sisi politik, meskipun ada instruksi dari pemerintah daerah, kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan bantuan nyata berupa perbaikan jaringan internet dan sarana komputer yang

merata. Temuan ini sangat sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa lingkungan luar (sosial, ekonomi, dan politik) sangat menentukan keberhasilan suatu program. Karena kondisi ekonomi masyarakat lemah dan dukungan politik pemerintah hanya sebatas aturan tanpa bantuan fasilitas, maka kebijakan ini kehilangan fungsinya di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-Rapor di sekolah ini gagal berjalan optimal karena lingkungan sekitar belum siap mendukung perubahan sistem dari manual ke digital.

f) Disposisi Pelaksana Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap atau penerimaan guru terhadap e-Rapor masih belum seragam. Komitmen yang belum merata ini merujuk pada aspek kesiapan mental, di mana sebagian guru menggunakan e-Rapor hanya untuk menggugurkan kewajiban, bukan karena memahami manfaat kebijakan untuk mempermudah pekerjaan. Rasa takut salah memasukkan data serta beban kerja tambahan menciptakan penolakan secara halus. Kondisi ini sangat sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa dukungan pelaksana sangat menentukan keberhasilan kebijakan. Jika pelaksana merasa terbebani dan tidak percaya pada manfaat sistem, maka program hanya akan menjadi formalitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-Rapor gagal berjalan optimal karena kurangnya motivasi dan keyakinan para guru terhadap nilai guna sistem digital tersebut.

2) Faktor Pendukung dan Penghambat

a) Faktor Pendukung

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi e-Rapor di SMAN 1 Abung Tinggi didukung oleh beberapa faktor, yaitu: (1) komitmen kepala sekolah dan manajemen sekolah, (2) keberadaan operator sekolah yang memiliki kompetensi TIK, (3) adanya pelatihan awal penggunaan e-Rapor, serta (4) kerja sama informal antar guru, khususnya antara guru muda dan guru senior. Faktor-faktor tersebut membantu sekolah tetap menjalankan e-Rapor meskipun dalam kondisi keterbatasan.

b) Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat implementasi e-Rapor meliputi: (1) keterbatasan literasi digital sebagian guru, (2) sarana prasarana dan jaringan internet yang belum memadai, (3) tidak adanya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, (4) lemahnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan, serta (5) rendahnya kesiapan dan literasi digital wali murid. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan implementasi e-Rapor lebih bersifat administratif dan belum mencapai tujuan substantif kebijakan digitalisasi pendidikan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran peneliti yaitu:

- 1) Penguatan regulasi internal dan kelembagaan sekolah, pihak sekolah perlu menyusun regulasi internal berupa Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim e-Rapor dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan e-Rapor. Regulasi ini diperlukan untuk memperjelas pembagian tugas, alur kerja, serta tanggung jawab masing-masing pelaksana agar implementasi e-Rapor tidak bergantung pada instruksi informal dan dapat berjalan secara sistematis serta berkelanjutan.
- 2) Peningkatan kompetensi dan literasi digital tenaga pendidik, sekolah bersama Dinas Pendidikan perlu menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penggunaan e-Rapor secara berkelanjutan, khususnya bagi guru senior yang masih mengalami kendala adaptasi teknologi. Pelatihan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga diarahkan pada pemahaman fungsi e-Rapor sebagai instrumen peningkatan mutu pembelajaran, bukan sekadar kewajiban administratif.
- 3) Penguatan sarana prasarana dan dukungan anggaran digitalisasi, pemerintah daerah dan sekolah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan dan pemeliharaan perangkat TIK serta peningkatan kualitas jaringan internet. Ketersediaan komputer yang layak dan akses internet yang stabil menjadi prasyarat utama agar proses input, verifikasi, dan sinkronisasi data e-Rapor dapat berjalan optimal dan tepat waktu.

- 4) Perbaikan komunikasi dan koordinasi antarorganisasi, Dinas Pendidikan diharapkan dapat menyampaikan informasi, pembaruan sistem, dan petunjuk teknis e-Rapor secara terencana, merata, dan tidak bersifat mendadak. Selain itu, diperlukan mekanisme pendampingan teknis yang responsif agar sekolah tidak harus menangani permasalahan teknis secara mandiri yang berpotensi menimbulkan kesalahan data.
- 5) Peningkatan keterlibatan dan akses wali murid, sekolah disarankan mulai mengembangkan mekanisme sosialisasi dan uji coba akses e-Rapor bagi orang tua secara bertahap. Penyediaan panduan sederhana dan layanan bantuan akan membantu wali murid memahami sistem rapor digital sehingga tujuan transparansi dan komunikasi hasil belajar dapat tercapai secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2021). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Antara. (2025). *Kemendikdasmen integrasikan 986 aplikasi dalam superapps Rumah Pendidikan*. https://umj.ac.id/just_info/kemendikdasmen-integrasikan-986-aplikasi-dalam-superapps-rumah-pendidikan
- dan Kebudayaan, K. P. (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Detik. (2025). *Kemendikbud bagikan smartboard untuk sekolah percontohan di Hardiknas*. <https://www.detik.com>
- DetikEdu. (2024). SNBP 2025 Pakai e-Rapor, Direktur SMA: Tak Bisa Cuci Rapor. *Detik.Com*. <https://www.detik.com/edu/seleksi-masuk-pt/d-7697518/snbp-2025-pakai-e-rapor-direktur-sma-tak-bisa-cuci-rapor>
- Dewi, D. R., & Sukiman, S. (2021). Implementasi Pelaporan Hasil Asesmen Berbasis E-Rapor. *JP (Jurnal Pendidikan) : Teori Dan Praktik*, 6(1), 37–42.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Program penerapan smart classroom pada 315 ribu sekolah*. Kemendikdasmen.
- Direktorat SMA. (2023). *Panduan penggunaan e-Rapor SMA versi 23.2*.
- Direktorat SMA. (2025). *Panduan penggunaan e-Rapor SMA versi 23.2*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Fajrin, N., & Machali, I. (2023). Implementasi Penggunaan Rapor Digital Madrasah (Rdm) Berbasis Online Dalam Menyusun Administrasi Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 177–189. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v7i1.36050>
- Fatmarianti, F. (2023). Analisis kebijakan publik dalam perspektif administrasi negara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 112–124.
- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen* (2nd ed.). BPFE.

- Harahap, M. A. K., Mahardhani, A. J., & Murthada. (2025). Strategies for Managing Information Technology Infrastructure to Improve Education Access in Remote Areas: A Comprehensive Approach to the Challenges and Solutions of Education Digitalization. *Technology and Society Perspectives (TACIT)*, 3(1), 314–321. <https://doi.org/10.61100/tacit.v3i1.254>
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., & Sukmana, D. J. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Hartati R, W. (2024). Penerapan E-Rapor Dalam Impelementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Kecamatan Luak. *Journal Of Social Science Research Volume, 4 Nomor 1*, 4923–4929.
- Indonesia, M. (2024). ARKAS dan e-kinerja dorong transparansi anggaran sekolah. In *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com>
- Indonesia.go.id. (2023). 288 ribu sekolah mulai terima program digitalisasi pembelajaran. <https://indonesia.go.id/kategori/sosial-budaya/9923/288-ribu-sekolah-di-indonesia-mulai-terima-program-digitalisasi-belajar>
- Insan, P. P., & Idris, N. Bin. (2024). Implementasi Penilaian Hasil Belajar Secara Digital Berbasis Aplikasi E-Rapor Untuk Dokumentasi Akademik. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Teknologi Informasi (JIPTI)*, 5(1), 105–113. <https://doi.org/10.52060/jipti.v5i1.1836>
- Iriawan, H. (2024). *Teori Kebijakan Publik* (1st ed.). Literasi Nusantara Abadi Grup.
- JIPP Nasional. (2024). *Integrasi teknologi digital dalam pendidikan Indonesia*. <https://jipp.kemdikbud.go.id>
- JOISIE. (2024). Evaluasi pengalaman pengguna terhadap aplikasi e-Rapor menunjukkan performa tinggi pada skala efisiensi, ketepatan, serta daya tarik antarmuka. *Jurnal JOISIE*, 8(1), 1–12. <https://ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/JOISIE/article/download/4013/1540>
- Kasmad, R. (2021). *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Cetakan Pe). CV Sah Media.
- Kementerian PANRB. (2024). *Strategi transformasi digital sektor pendidikan melalui program Merdeka Belajar*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Kemendikbud.

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Program literasi digital nasional untuk satuan pendidikan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Petunjuk teknis implementasi e-Rapor Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat SMA. (2024). *Rilis Aplikasi e-Rapor SMA untuk Kurikulum 2013 versi k13.1*. <https://sma.kemdikbud.go.id/berita/rilis-aplikasi-e-rapor-sma-untuk-kurikulum-2013-versi-k13-1>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024a). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024b). *Petunjuk Teknis e-Rapor Kurikulum 2013*. Kemdikbudristek.
- Kusuma, D. H. (2020). Dinamika proses kebijakan publik dalam perspektif analisis kebijakan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(1), 45–58.
- Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta. (2025). *Integrasi coding dan artificial intelligence (AI) dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah*. LPMP DKI Jakarta.
- Liputan6. (2025). *Pemerintah targetkan smart classroom di 315 ribu sekolah*. <https://www.liputan6.com>
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung (Pusaka Media).
- Nugraha, D. N., & Anggraini, Y. (2019). Digitalisasi pembelajaran di sekolah pedalaman (Implementasi pembelajaran berbasis komputer di SD Bina Dharma Muara Tiga dan Kebun Sentral Sumatera Utara). *Jurnal Pendidikan Dasar Setiabudhi*, 3(1), 1–10. <https://jurnal.usbr.ac.id/jpds/article/view/33>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 116.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 240.

- Pratolo, B. W., Fatimah, N., Soviyah, S., & Ali, Z. (2023). Digital Literacy Readiness: Voices of Indonesian Primary and Secondary English Teachers. *English Language Teaching Educational Journal*, 5(2), 129–142. <https://doi.org/10.12928/eltej.v5i2.6562>
- Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Kemendikbudristek. (2022). Pemanfaatan Rapor Pendidikan untuk mendukung transformasi kebijakan pendidikan (Episode Merdeka Belajar ke-19). *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 17(1), 45–62. <https://jurnalpuslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/index.php/litjak/article/view/830/249>
- Putri, D. A., & Firmansyah, H. (2023). Implementasi digitalisasi penilaian melalui e-Rapor di SMA. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 15(2), @article{nugrahaAnggraini2019, author = {Nugraha,.
- Rusdiyanta, Subiyakto, R., & Pujiyono, B. (2022). *Kebijakan Publik: Aktor, Model, dan Proses*. Suluh Media.
- SMA, D. (2023). *Panduan penggunaan e-Rapor SMA versi 23.2*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Cetakan ke). Alfabeta.
- Sultra, B. (2025). *Rumah Pendidikan integrasikan 986 aplikasi bikin materi pembelajaran interaktif makin mudah*. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/wkBrZoak-rumah-pendidikan-integrasikan-986-aplikasi-bikin-materi-pembelajaran-interaktif-makin-mudah>
- SUYATNO, S. (2023). E-Rapor Pada Sekolah Dasar Negeri Cawang 09 Jakarta Berbasis Web. *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset Dan Observasi Sistem Komputer*, 10(1), 33–40. <https://doi.org/10.30656/prosisko.v10i1.6232>
- Syahrudin. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Studi Kasus*. NUSAMEDIA.
- Tirto.id. (2024). *Platform teknologi Kemendikbudristek percepat digitalisasi*. <https://tirto.id/platform-teknologi-kemendikbudristek-percepat-digitalisasi-g2Lo>
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Zulaikha, S., Fadholi, M., Sururi, S., Syahril, S., & Ariyanti, P. N. (2022). “Bridging the digital divide”: Assessing and advancing teachers’ digital literacy across Indonesian provinces. *Journal of Educational Management and Instruction*, 5(1). <https://doi.org/10.22515/jemin.v5i1.11586>